

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Pemerintah Kabupaten Barito Utara  
Tahun Anggaran 2025



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yang merupakan alat kendali dan penilai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Selain itu LKIP merupakan salah satu instrumen bagi Kepala Daerah untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini menyajikan pencapaian setiap sasaran strategis Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini juga berisi analisis faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan serta langkah tindak lanjut untuk memenuhi target kinerja di tahun yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pembangunan daerah atas anggaran yang telah diamanahkan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Selain itu keberadaan LKIP ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh

Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang turut berperan aktif memberikan masukan terhadap kesempurnaan Penyusunan LKIP Kabupaten Barito Utara Tahun 2025. Kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Pengawasan yang telah memberikan masukan dan koreksi terhadap dokumen-dokumen SAKIP Kabupaten Barito Utara. Kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan tim penyusun LKIP Kabupaten Barito Utara serta pihak-pihak lain yang terkait.

Muara Teweh, 12 Maret 2026  
Bupati Barito Utara,  
  
Shalahuddin



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Barito Utara berupaya berkomitmen dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) dan selalu berorientasi pada hasil sebagaimana tuntutan pada era reformasi sekarang ini. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan wajib terpenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam masa transisi kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 110,49% (predikat Baik Sekali) mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 106,52%. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2025, yaitu 17 indikator atau 68% bermakna Baik Sekali, 6 indikator atau 24% bermakna Baik dan 2 atau 8% bermakna Cukup.

Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU), 18 indikator mampu memenuhi/melampaui target 100% dan 7 indikator belum memenuhi target (di bawah 100%). Adapun IKU yang mampu memenuhi target dengan capaian kinerja 100% atau lebih antara lain:



1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
2. Persentase desa/kelurahan blankspot
3. Rata-rata lama sekolah
4. Angka Harapan Hidup
5. PDRB sektor perikanan
6. PDRB sektor perkebunan
7. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah
8. PDRB sektor perdagangan
9. PDRB sektor industri
10. Persentase kunjungan wisata
11. Pengeluaran perkapita pertahun
12. Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
13. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
14. Persentase kasus konflik yang tertangani
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
16. Angka Prevalensi Stunting
17. Indeks Reformasi Birokrasi
18. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mampu mencapai target 100% antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
2. Angka Melek Huruf
3. PDRB sektor pertanian
4. Angka Pengangguran Terbuka
5. Persentase penduduk miskin
6. Nilai SAKIP
7. Opini BPK

## DAFTAR ISI

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR.....                                            | i   |
| IKHTISAR EKSEKUTIF .....                                       | iii |
| DAFTAR ISI.....                                                | v   |
| DAFTAR TABEL.....                                              | vi  |
| DAFTAR GAMBAR .....                                            | vii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                        | 1   |
| 1.1 Latar Belakang.....                                        | 1   |
| 1.2 Gambaran Umum Kabupaten Barito Utara .....                 | 1   |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi .....                             | 5   |
| 1.4 Isu Strategis Daerah .....                                 | 9   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                               | 13  |
| 2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026 .....                    | 13  |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara .....       | 21  |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 ..... | 25  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                            | 29  |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....                           | 29  |
| 3.2 Analisis Capaian Kinerja .....                             | 47  |
| 3.3 Realisasi Anggaran .....                                   | 77  |
| BAB IV PENUTUP .....                                           | 84  |
| 4.1 Kesimpulan .....                                           | 84  |
| 4.2 Rencana Tindak Lanjut .....                                | 85  |
| LAMPIRAN                                                       |     |
| • Indikator Kinerja Utama                                      |     |
| • Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2025         |     |
| • Rencana Aksi Tahun 2025                                      |     |

## DAFTAR TABEL

|          |                                                                                                                      |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1  | : Luas Daerah Perkecamatan Kabupaten Barito Utara .....                                                              | 3  |
| Tabel 2  | : Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2025.....                                                                      | 4  |
| Tabel 3  | : Jumlah Eselon Sebelum dan Sesudah Penyederhanaan Birokrasi .....                                                   | 8  |
| Tabel 4  | : Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator .....                                                                    | 19 |
| Tabel 5  | : Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara Sebelum dan Sesudah Penyesuaian .....                               | 21 |
| Tabel 6  | : Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.....                                                          | 25 |
| Tabel 7  | : Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 .....                                                         | 30 |
| Tabel 8  | : Penjelasan/perhitungan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ..                                                       | 32 |
| Tabel 9  | : Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025 .....                                                                         | 39 |
| Tabel 10 | : Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan 2025.....                                                                      | 41 |
| Tabel 11 | : Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Target pada RPD 2024-2026 .....                                             | 44 |
| Tabel 12 | : Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan Nasional                                                        | 46 |
| Tabel 13 | : Analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tahun 2024 serta langkah perbaikan/solusi ..... | 47 |
| Tabel 14 | : Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran serta tingkat efisiensi .....                                            | 62 |
| Tabel 15 | : Program penunjang pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara.....                                 | 67 |
| Tabel 16 | : Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Target Kinerja.....                                       | 74 |

## DAFTAR GAMBAR

|          |   |                                                                             |   |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| Gambar 1 | : | Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara .....                      | 2 |
| Gambar 2 | : | Analisis isu strategis yang menghasilkan permasalahan<br>utama daerah ..... | 9 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah, yang secara eksternal merupakan alat kendali dan penilai pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Governance*. Secara Internal LKIP merupakan salah satu instrumen bagi Kepala Daerah untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

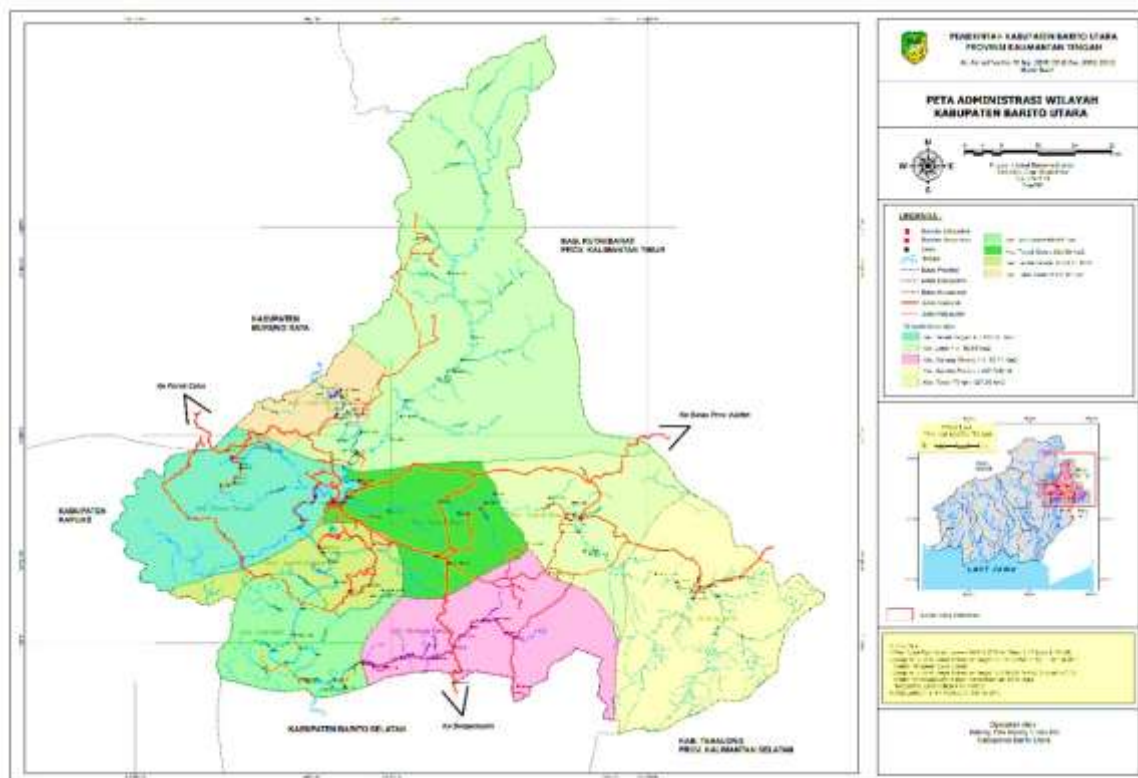
### **1.2 Gambaran Umum Kabupaten Barito Utara**

#### **1.2.1 Kondisi Geografis**

Kabupaten Barito Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di tengah-tengah pulau Kalimantan dan terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 114<sup>0</sup>27'3,32"-115<sup>0</sup>50'47" Bujur Timur dan 0<sup>0</sup>49'00" Lintang Utara-1<sup>0</sup>27'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Murung Raya.



Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara

Luas wilayah Kabupaten Barito Utara secara hukum tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 sebagaimana yang dipublikasikan BPS Kabupaten Barito Utara dalam katalog Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2023, luas wilayah Kabupaten Barito Utara adalah 10.152,25 km<sup>2</sup> atau seluas 6,51% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara administrasi pemerintahan, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 93 desa dan 10 kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Barito Utara adalah Kecamatan Lahei dengan luas wilayah 3.219,39 km<sup>2</sup>, atau 31,84% terhadap luas Kabupaten Barito Utara, kemudian Kecamatan

Gunung Purei seluas 1.435,80 km<sup>2</sup> atau 14,20% dari luas Kabupaten Barito Utara; sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Lahei Barat yaitu 340,26 km<sup>2</sup> atau 3,36% dari luas Kabupaten Barito Utara.

Tabel 1.

Luas Wilayah Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan

| No                  | Kecamatan     | Ibukota Kecamatan | Jumlah Desa/<br>Kelurahan | Luas (km <sup>2</sup> ) | Persentase<br>Luas (%) |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1                   | Montallat     | Tumpang Laung II  | 10                        | 694,63                  | 6,87                   |
| 2                   | Gunung Timang | Kandui            | 16                        | 1.066,31                | 10,54                  |
| 3                   | Gunung Purei  | Lampeong          | 11                        | 1.435,80                | 14,20                  |
| 4                   | Teweh Timur   | Benangin I        | 12                        | 921,58                  | 9,11                   |
| 5                   | Teweh Tengah  | Muara Teweh       | 10                        | 1.144,40                | 11,32                  |
| 6                   | Teweh Baru    | Hajak             | 10                        | 808,70                  | 8,00                   |
| 7                   | Teweh Selatan | Trahean           | 10                        | 481,17                  | 4,76                   |
| 8                   | Lahei         | Lahei II          | 13                        | 3.219,39                | 31,84                  |
| 9                   | Lahei Barat   | Benao Hulu        | 11                        | 340,26                  | 3,36                   |
| <b>Barito Utara</b> |               |                   | <b>103</b>                | <b>10.152,25</b>        | <b>100,00</b>          |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2025

Topografi dan morfologi daerah Kabupaten Barito Utara terdiri dari sebelah Selatan ke Timur merupakan dataran agak rendah sedangkan ke arah Utara dengan bentuk daerah lipatan, patahan yang dijajari oleh pegunungan Muller/Schwaner. Bagian wilayah dengan kelerengan 0-2% terletak dibagian selatan tepi Sungai Barito yaitu kecamatan Montallat dan Teweh Tengah seluas 165 km<sup>2</sup> (29,2%). Bagian wilayah dengan kemiringan 2-15% tersebar di semua kecamatan seluas 4.785 km<sup>2</sup> (21,5%). Kemiringan 15-40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 km<sup>2</sup> (51,5%) dan bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% seluas 2.075 km<sup>2</sup> (25%).

Berdasarkan keadaan tanah yang ada, maka jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Barito Utara yaitu Aluvial terdapat di aliran sungai, regosol terdapat menyebar di bagian selatan wilayah kabupaten Barito Utara, podsolik merah kuning dengan induk batu-batuan dan batuan beku terdapat di wilayah perbukitan,

kambisol dan okisol (laterit) terdapat di wilayah bagian atas dan paling luas, keadaan bergelombang dan berbukit.

Iklim di Kabupaten Barito Utara termasuk iklim basah, dengan suhu udara berkisar antara 23,4°C sampai dengan 33,5°C. Rata-rata curah hujan tercatat 291 mm<sup>3</sup> dan rata-rata hari hujan sebanyak 20 hari setiap bulan. Kelembaban udara rata-rata 84 persen.

Sungai utama yang ada di Kabupaten Barito Utara adalah Sungai Barito. Sungai Barito mengalir dari daerah hulu di Kabupaten Murung Raya melewati Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, hingga ke Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Sungai ini tercatat mempunyai panjang lebih kurang 900 km (dapat dilayari 780 km), lebar rata-rata 650 meter dengan kedalaman 8 meter dan bermuara ke Laut Jawa. Selain itu sungai yang cukup berperan dalam sistem hidrologi di Kabupaten Barito Utara adalah sungai Montallat, sungai Teweh dan sungai Lahei yang merupakan anak sungai Barito.

### 1.2.2 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Barito Utara pada tahun 2023 berjumlah 160.605 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2023 tergolong jarang yaitu 16 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teweh Tengah, yaitu sebesar 54 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal tersebut dikarenakan ibukota Kabupaten Barito Utara yaitu Muara Teweh yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi masyarakat terletak di Kecamatan Teweh Tengah.

Tabel 2.

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2025

| No | Kecamatan     | Jumlah Penduduk (jiwa) | Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 (%) |
|----|---------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Montallat     | 12.356                 | 0,36                                              |
| 2  | Gunung Timang | 13.231                 | 1,22                                              |
| 3  | Gunung Purei  | 2.827                  | 0,54                                              |
| 4  | Teweh Timur   | 6.609                  | 0,55                                              |
| 5  | Teweh Tengah  | 63.617                 | 1,85                                              |
| 6  | Teweh Baru    | 23.839                 | 1,61                                              |
| 7  | Teweh Selatan | 15.965                 | 0,94                                              |

| No     | Kecamatan   | Jumlah Penduduk (jiwa) | Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 (%) |
|--------|-------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| 8      | Lahei       | 14.273                 | 0,62                                              |
| 9      | Lahei Barat | 11.904                 | 0,82                                              |
| Jumlah |             | <b>164.621</b>         | <b>1,30</b>                                       |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, 2026*

Berdasarkan data di dalam katalog Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2026 yang dipublikasikan oleh BPS Kabupaten Barito Utara, penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2025 yang teregistrasi terdiri dari 85.120 jiwa penduduk laki-laki dan 79.501 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 sebesar 1,30%.

### 1.3 Gambaran Umum Organisasi

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.

Dalam perubahan pertama Peraturan Daerah berisi penguatan kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Evaluasi kelembagaan dilakukan menyangkut struktur organisasi, budaya organisasi dan inovasi organisasi. Struktur organisasi meliputi besaran organisasi, susunan, perumpunan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.

Adapun susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A
2. Sekretariat DPRD Tipe C
3. Inspektorat Tipe B
4. Dinas Daerah :
  - 1) Dinas Pendidikan Tipe A;
  - 2) Dinas Kesehatan Tipe B;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A;
  - 4) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B;
  - 5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
  - 6) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A;
  - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
  - 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A;
  - 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
  - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
  - 11) Dinas Perhubungan Tipe B;
  - 12) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B;
  - 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
  - 14) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A;
  - 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B;
  - 16) Dinas Pertanian Tipe A;
  - 17) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B;
  - 18) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C; dan
  - 19) Satuan Polisi Pamong Praja dan Tipe B.
5. Badan Daerah :
  - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe B;
  - 2) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A;
  - 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tipe A;
  - 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C;

- 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A; dan
- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A.
6. Kecamatan :
  - 1) Kecamatan Teweh Tengah Tipe A ibu kota di Muara Teweh;
    - a) Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah;
    - b) Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah;
  - 2) Kecamatan Teweh Baru Tipe A ibu kota di Hajak;
    - a) Kelurahan Jingah Kecamatan Teweh Baru;
    - b) Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru;
  - 3) Kecamatan Teweh Selatan Tipe A ibu kota di Trahean;
  - 4) Kecamatan Montallat Tipe A ibu kota di Tumpung Laung;
    - a) Kelurahan Tumpung Laung I Kecamatan Montallat;
    - b) Kelurahan Tumpung Laung II Kecamatan Montallat;
    - c) Kelurahan Montallat I Kecamatan Montallat;
    - d) Kelurahan Montallat II Kecamatan Montallat;
  - 5) Kecamatan Gunung Timang Tipe A ibu kota di Kandui;
  - 6) Kecamatan Teweh Timur Tipe A ibu kota di Benangin;
  - 7) Kecamatan Gunung Purei Tipe A ibu kota di Lampeong;
  - 8) Kecamatan Lahei Tipe A ibu kota di Muara Lahei;
    - a) Kelurahan Lahei I Kecamatan Lahei;
    - b) Kelurahan Lahei II Kecamatan Lahei;
  - 9) Kecamatan Lahei Barat Tipe A ibu kota di Benao;

Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas sebanyak 20 (termasuk Satpol PP);
2. Badan sebanyak 6;
3. Sekretariat Daerah sebanyak 1;
4. Sekretariat DPRD sebanyak 1;
5. Inspektorat sebanyak 1; dan
6. Kecamatan sebanyak 9, termasuk 10 Kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,



Pemerintah Kabupaten Barito Utara menindaklanjuti dengan melakukan penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah.

Desain Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) diusulkan melalui Surat Bupati Barito Utara No.065/47/RG tanggal 28 Juni 2021 mendapatkan pengantar dari Gubernur Kalimantan Tengah No.060/290/ORG dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri melalui surat No.061/4250/OTDA Hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Saat ini struktur organisasi untuk 26 Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara tentang SOTK perangkat daerah masing-masing. Penyederhanaan Struktur Organisasi selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyetaraan jabatan dari pejabat struktural ke jabatan fungsional.

Penyetaraan jabatan telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Sesuai Surat Nomor 800/8498/OTDA tanggal 24 Desember 2021. Jumlah jabatan yang mendapat persetujuan dari Kemendagri untuk disetarakan sebanyak 243 Jabatan. Dilaksanakan pelantikan pejabat eselon IV ke jabatan fungsional pada tanggal 30 Desember 2021 sesuai Keputusan Bupati Barito Utara No 188.45/422/2021.

Adapun perubahan jumlah jabatan eselon sebelum dan sesudah penyederhanaan birokrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.

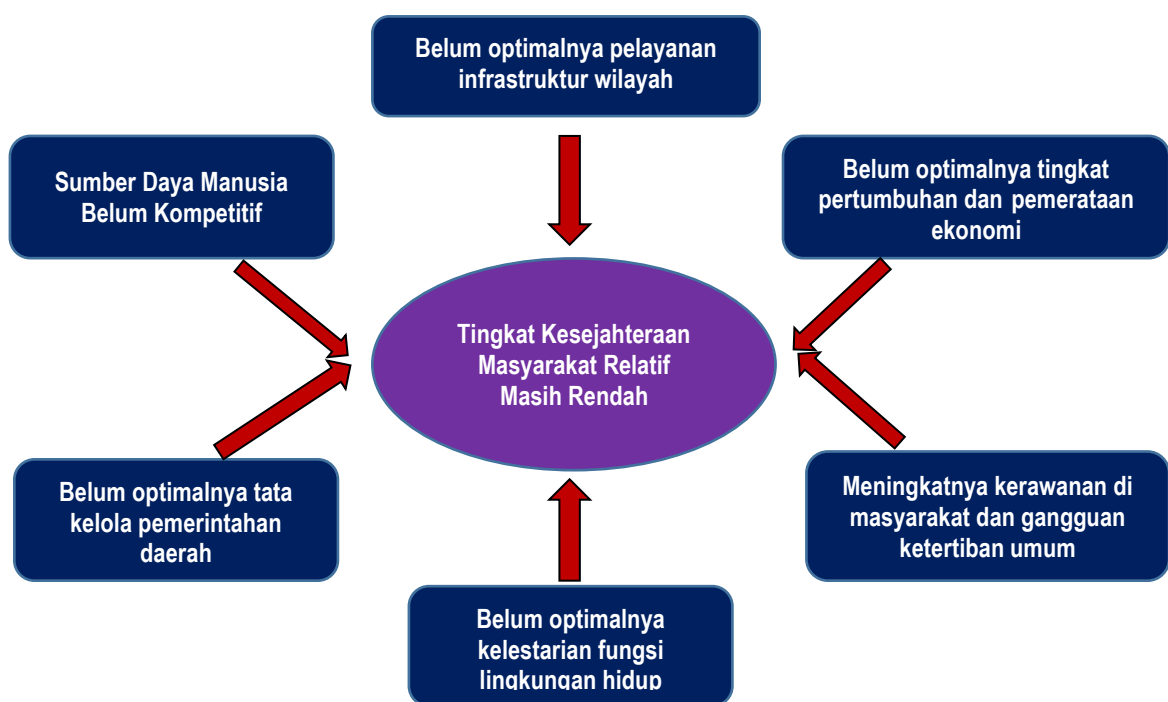
Jumlah Eselon Sebelum dan Sesudah Penyederhanaan Birokrasi

| No.    | Eselon       | Jumlah  |         | Jumlah disederhanakan |
|--------|--------------|---------|---------|-----------------------|
|        |              | Sebelum | Sesudah |                       |
| 1      | Eselon II a  | 1       | 1       | -                     |
| 2      | Eselon II b  | 32      | 32      | -                     |
| 3      | Eselon III a | 50      | 50      | -                     |
| 4      | Eselon III b | 101     | 101     | -                     |
| 5      | Eselon IV a  | 446     | 203     | 243                   |
| 6      | Eselon IV b  | 92      | 92      | -                     |
| Jumlah |              | 722     | 479     | 243                   |

#### 1.4 Isu Strategis Daerah

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara yang diperoleh dari analisis permasalahan daerah secara singkat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah.
2. Sumber Daya Manusia Belum Kompetitif.
3. Belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
4. Meningkatnya kerawanan di masyarakat dan gangguan ketertiban umum.
5. Belum optimal kelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah.



Gambar 2. Analisis Isu Strategis yang menghasilkan permasalahan utama daerah

Masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Utara adalah tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah. Rendahnya kesejahteraan tersebut bermula dari belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah karena infrastruktur merupakan barang komplementer yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi. Terjaminnya ketersediaan infrastruktur dapat mendorong kegiatan ekonomi wilayah dan peningkatan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi

tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan tetapi memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur, kesenjangan antar wilayah dapat diminimalisasi, namun untuk memadukan pembangunan infrastruktur maka dilakukan pendekatan pembangunan melalui wilayah pertumbuhan. Membangun infrastruktur saat ini harus berbasis kewilayahan, sehingga pembangunan infrastruktur tidak sekedar dalam bentuk fisik saja, tapi membangun kawasan yang terkoneksi satu sama lain. Kemudian juga suatu kawasan digali potensi yang ada, sehingga dapat berkembang dan juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Barito Utara akan memajukan daerah, menggerakkan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat persatuan dan kesatuan.

Sejumlah kendala membuat lambatnya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara seperti kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif, kelembagaan dan struktur sosial ekonomi dan ketersediaan infrastruktur yang kurang mendukung. Sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial tetapi belum bisa mendatangkan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat karena berbagai permasalahan salah satunya adalah kualitas sumber daya manusia yang belum kompetitif. sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembangunan. Pada era globalisasi dan otonomi daerah. Sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas merupakan syarat penting bagi tercapainya pembangunan ekonomi. Pendidikan yang didukung oleh kesehatan dan fasilitas infrastruktur yang baik memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan memiliki makna bagi perbaikan kualitas bangsa, sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan potensi dasar yang dimiliki bangsa. Kebijakan fiskal menjadi instrumen penting dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Peningkatan pengeluaran kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan akumulasi aset/modal SDM (*human capital*). Penanganan SDM sebagai *human capital* menunjukkan bahwa hasil dari investasi non fisik jauh lebih tinggi dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik. Peningkatan *human capital* diharapkan dapat meningkatkan produktivitas

tenaga kerja serta dapat mendorong kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memutus rantai kemiskinan. Kedepannya Kabupaten Barito Utara harus mengutamakan aspek pembangunan sumber daya manusia yang memiliki tiga pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan serta pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya.

Hal lain yang sangat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat adalah belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Karena meskipun pertumbuhan ekonomi di Barito Utara dari tahun ke tahun terjadi pertumbuhan yang positif, namun pertumbuhan yang diraih masih belum mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain belum ada pemerataan kesejahteraan.

Menggapai pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Barito Utara, pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada dasarnya akan berkualitas, jika pertumbuhan ekonominya berkontribusi menekan berkurangnya jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja. Fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas penting karena secara empiris berkorelasi positif terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan indikator kesejahteraan lainnya. Secara sederhana kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan tersebut ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin Kedua, semakin kecilnya jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama masyarakat di suatu daerah.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Barito Utara harus ditingkatkan kualitasnya, dengan peningkatan penegakan perda, dan peningkatan pelayanan perijinan (kemudahan akses, transparan dan cepat) karena kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan akan sangat berpengaruh kepada tingkat kemandirian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin

daerah saja, melainkan tanggung jawab setiap masyarakat. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Kedepannya pemerintah Kabupaten Barito Utara agar lebih memperhatikan efek negatif Pembangunan, karena yang merasakan dampak negatif langsung adalah masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Tata kelola pemerintahan dari segi ekonomi sangat berdampak kepada tingkat kesejahteraan, bahwa suatu daerah telah mencapai tata kelola yang baik apabila telah berhasil menyelenggarakan sistem pengaturan pembangunan daerah yang kuat, serta bertanggung jawab, dengan tetap beriringan dengan prinsip demokrasi dan prinsip pasar yang efisien. Di samping itu, dalam tata kelola pemerintah yang baik akan menghindari kesalahan dalam alokasi dana pembangunan, termasuk penanggulangan dini tindak pidana korupsi. *Good governance* juga akan menjalankan anggaran secara disiplin sehingga aktivitas usaha rakyat dapat tumbuh dengan baik.

Pemerintahan yang baik adalah baik dalam proses maupun hasilnya. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari masyarakat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan. Pemerintahan juga bisa dikatakan baik jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi masyarakat meningkat, baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya; kesejahteraan spiritualnya meningkat dengan indikator rasa aman, bahagia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026**

Rencana Strategis Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara pada masa transisi sampai dengan tersedianya Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara hasil Pilkada Serentak Tahun 2024. Disamping itu, RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 ini juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan masa transisi pasca Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pedoman transisi dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode Dokumen RPD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya, sehingga tidak terjadi kekosongan pedoman perencanaan pembangunan, sebagai upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

##### **2.1.1 Visi**

Sesuai Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota, analisa

pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahap keempat dan isu strategis actual.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005–2025 merupakan pedoman pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Mengacu kepada hal tersebut maka periode Tahun 2024-2026 ini adalah merupakan periode keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Selatan 2005-2025 yang memiliki Visi untuk mewujudkan **“Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri”** .

### 2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2005-2025 sebagai berikut:

#### 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Manusia adalah modal utama pembangunan dan yang akan menikmati hasil hasil pembangunan. Manusia yang berkualitas akan tercipta melalui pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian serta keagamaan. Karenanya pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan harus dapat menjamin bahwa tingkat perekonomian masyarakat tidak menjadi kendala utama bagi masyarakat untuk memperolehnya. Perekonomian yang maju secara merata diberbagai daerah akan memacu dan memberi peluang untuk dapat memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas. Pembangunan bidang pendidikan harus disertai dan dilengkapi dengan pembangunan keagamaan yang berkualitas sehingga terjamin bahwa manusia yang terbangun di Kabupaten Barito Utara adalah manusia dengan kualitas keahlian, keterampilan yang berkualitas lebih baik serta memiliki keimanan serta taqwa (Imtaq) kepada Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang maju, mandiri, adil dan sejahtera, sehingga memiliki daya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia dimaksudkan untuk menanggulangi kemiskinan dan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia



yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kesehatan yang semakin meningkat, semakin berperannya perempuan dan generasi muda dalam pembangunan daerah. Pencapaian indikator Milenium Development Goal (MDGs) adalah menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan untuk mensejajarkan bahkan melampaui prestasi yang diperoleh oleh Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

## **2. Membangun Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Antar Wilayah.**

Akses dan perhatian terhadap infrastruktur untuk kawasan perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur diperhatikan dengan seksama sehingga wilayah perbatasan mempunyai akses yang lebih baik untuk mencapai daerah Kabupaten Barito Utara lainnya dan Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya. Oleh karena itu pembukaan isolasi daerah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan berkualitas sehingga mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; Sarana dan prasarana yang dikembangkan dapat bersifat massif, cepat dan sebanyak mungkin mengakomodasi kepentingan masyarakat, mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat.

## **3. Memperkuat Perimbangan dan Daya Saing Perekonomian Daerah.**

Pengembangan perekonomian yang berimbang pada berbagai daerah di Kabupaten Barito Utara sesuai potensinya akan memberikan pondasi yang kuat bagi pengembangan perekonomian Daerah yang kuat pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu perekonomian daerah dikembangkan dengan memperkuat perekonomian daerah serta berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis

keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Pembangunan perekonomian untuk daerah perbatasan dengan Kalimantan Timur harus dilakukan dengan lebih seksama karena nampaknya kawasan ini adalah kawasan yang harus mendapat perhatian lebih dari sebelumnya agar perekonomian pada seluruh daerah yang berbatasan dengan Kalimantan Timur berkembang secara berimbang dengan daerah lainnya di Kabupaten Barito Utara. Untuk itu peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan harus semakin ditingkatkan, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan daerah secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi termasuk jasa keuangan yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

#### **4. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara Sejahtera dan Lestari.**

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan yang bertumpu dan dibangun atas prinsip keberlanjutan, baik yang menyangkut sumberdaya alam, manusia dan modal. Oleh karena itu melalui misi ini pengelolaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara harus mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan harus dibarengi dengan memperbaiki tatacara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk yang mendukung perbaikan kualitas kehidupan manusia secara berkelanjutan seraya terus memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan dengan terus meningkatkan

pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Sumberdaya manusia yang ada harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara lestari dan bernilai tambah tinggi yang juga berarti akan menghasilkan kegiatan perekonomian yang lebih efisien yang dengan demikian harus dibarengi dengan pengembangan akses yang lebih mudah bagi semua masyarakat pada berbagai daerah untuk memperoleh modal.

#### **5. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.**

Pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara diwujudkan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan infrastruktur yang mendukung untuk berkembangnya potensi dimaksud. Secara khusus untuk daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan melakukan pengembangan potensi yang sinergis dengan pengembangan potensi yang dilakukan pada oleh Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu perwujudan dari misi ini adalah dengan meningkatkan pembangunan daerah secara berimbang sesuai kebutuhan riil daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, mengembangkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilakukan secara terencana dengan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi seraya terus menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk isu yang berhubungan dengan gender. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah. Selain itu perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka untuk memberikan rasa kebersamaan sebagai warga Kabupaten Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **2.1.3 Tujuan**

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam masa transisi. Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan di capai dalam merespon isu strategis perencanaan, berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual yang berkelanjutan dalam pembangunan, maka dirumuskan Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah.
2. Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Penurunan angka stunting dan kemiskinan
8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

### **2.1.4 Sasaran**

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah;
2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik.
3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot.
4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
6. Meningkatnya sektor pertanian.
7. Meningkatnya sektor perikanan.
8. Meningkatnya Sektor perkebunan.
9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM
10. Meningkatnya sektor perdagangan
11. Meningkatnya sektor industri
12. Meningkatnya daya saing pariwisata
13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja

14. Meningkatnya daya beli masyarakat
15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial
16. Meningkatnya ketertiban masyarakat
17. Meningkatnya penanganan konflik
18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
19. Menurunnya stunting
20. Menurunnya kemiskinan
21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi
22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
23. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
24. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah

Tabel 4.  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator

| Tujuan                                                        | Sasaran                                                          | Indikator                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Peningkatan Infrastruktur wilayah.                            | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah; | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    |
|                                                               | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik.              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik |
|                                                               | Menurunnya desa/kelurahan blankspot.                             | Persentase desa/kelurahan blankspot                              |
| Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                       | Rata-rata lama sekolah                                           |
|                                                               |                                                                  | Angka melek huruf                                                |
| Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.           | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                        | Angka Harapan Hidup                                              |
|                                                               | Meningkatnya sektor pertanian                                    | PDRB sektor pertanian                                            |
|                                                               | Meningkatnya sektor perikanan                                    | PDRB sektor perikanan                                            |
|                                                               | Meningkatnya sektor perkebunan                                   | PDRB sektor perkebunan                                           |
|                                                               | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM                             | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah                    |
|                                                               | Meningkatnya sektor perdagangan                                  | PDRB sektor perdagangan                                          |
|                                                               | Meningkatnya sektor industri                                     | PDRB sektor industri                                             |

| Tujuan                                                          | Sasaran                                                                    | Indikator                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | Meningkatnya daya saing pariwisata                                         | Persentase kunjungan wisata                                                  |
| Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                                       | Angka pengangguran terbuka                                                   |
|                                                                 | Meningkatnya daya beli masyarakat                                          | Pengeluaran perkapita pertahun                                               |
|                                                                 | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial                       | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            |
| Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.          | Meningkatnya ketertiban masyarakat                                         | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) |
|                                                                 | Meningkatnya penanganan konflik                                            | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     |
|                                                                 | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             |
| Penurunan angka stunting dan kemiskinan                         | Menurunnya stunting                                                        | Angka Prevalensi Stunting                                                    |
|                                                                 | Menurunnya kemiskinan                                                      | Persentase penduduk miskin                                                   |
| Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.      | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                                   |
|                                                                 | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                                                                  |
|                                                                 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                             |
|                                                                 | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                                   | Opini BPK                                                                    |
|                                                                 | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                                   |

## 2.2 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara

Dalam rangka memperoleh indikator kinerja utama yang lebih berorientasi hasil (*outcome*) dan memenuhi kriteria SMART dilakukan penyesuaian terhadap rumusan indikator kinerja utama pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Tabel 5.

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Utara Sebelum dan Sesudah Penyesuaian

| IKU pada RPD 2024-2026 (Sebelum Penyesuaian) |                                                                                                         |                                                                  | Penyesuaian                                                         | IKU Sesudah Penyesuaian                                         |                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| No.                                          | Sasaran                                                                                                 | Indikator                                                        |                                                                     | Sasaran                                                         | Indikator                                                        |
| 1                                            | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan                                    | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    |
| 2                                            | Meningkatnya Infrastruktur perdesaan dan pengembangan jaringan listrik kelistrikan serta energi lainnya | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik |
| 3                                            | Berkembangnya jaringan telekomunikasi dan informasi                                                     | Persentase desa/kelurahan blankspot                              | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>                      | Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>                       |
| 4                                            | Meningkatnya minat wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun                                        | Rata-rata lama sekolah                                           | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                      | Rata-rata lama sekolah                                           |
|                                              |                                                                                                         | Angka melek huruf                                                |                                                                     |                                                                 | Angka melek huruf                                                |
| 5                                            | Meningkatnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik                                                   | Rasio tenaga pendidik terhadap murid                             | Dikeluarkan dari IKU Kabupaten dan dijadikan IKU pada tingkat Dinas |                                                                 |                                                                  |
| 6                                            | Meningkatnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan            | Angka Harapan Hidup                                              | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                       | Angka Harapan Hidup                                              |



| IKU pada RPD 2024-2026 (Sebelum Penyesuaian) |                                                                                                                |                                               | Penyesuaian                                                   | IKU Sesudah Penyesuaian              |                                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No.                                          | Sasaran                                                                                                        | Indikator                                     |                                                               | Sasaran                              | Indikator                                     |
| 7.                                           | Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil pertanian        | PDRB sektor pertanian                         | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya sektor pertanian        | PDRB sektor pertanian                         |
| 8.                                           | Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perikanan        | PDRB sektor perikanan                         | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya sektor perikanan        | PDRB sektor perikanan                         |
| 9.                                           | Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perkebunan       | PDRB sektor perkebunan                        | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya sektor perkebunan       | PDRB sektor perkebunan                        |
| 10.                                          | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri         | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah | Rumusan sasaran diubah dan dipecah menjadi 3, indikator tetap | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah |
|                                              |                                                                                                                | PDRB sektor perdagangan                       |                                                               | Meningkatnya sektor perdagangan      | PDRB sektor perdagangan                       |
|                                              |                                                                                                                | PDRB sektor industri                          |                                                               | Meningkatnya sektor industri         | PDRB sektor industri                          |
| 11.                                          | Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi | Angka pengangguran terbuka                    | Dihilangkan dan disinergikan dengan sasaran 13                |                                      |                                               |
|                                              |                                                                                                                | Pendapatan Perkapita Penduduk                 |                                                               |                                      |                                               |
| 12.                                          | Berkembangnya pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan                                         | Kunjungan wisata                              | Rumusan sasaran diubah, indikator disempurnakan               | Meningkatnya daya saing pariwisata   | Persentase kunjungan wisata                   |

| IKU pada RPD 2024-2026 (Sebelum Penyesuaian) |                                                                                                                                                |                                                                              | Penyesuaian                                                   | IKU Sesudah Penyesuaian                              |                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                          | Sasaran                                                                                                                                        | Indikator                                                                    |                                                               | Sasaran                                              | Indikator                                                                    |
| 13.                                          | Meningkatnya kesempatan kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif                                                                         | Angka pengangguran terbuka                                                   | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                 | Angka pengangguran terbuka                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                | Pengeluaran perkapita pertahun                                               | Rumusan sasaran ditambahkan, indikator tetap                  | Meningkatnya daya beli masyarakat                    | Pengeluaran perkapita pertahun                                               |
| 14.                                          | Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            |
| 15.                                          | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan konflik dan pengembangan wawasan kebangsaan dan politik                       | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | Rumusan sasaran diubah dan dipecah menjadi 2, indikator tetap | Meningkatnya ketertiban masyarakat                   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) |
|                                              |                                                                                                                                                | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     |                                                               | Meningkatnya penanganan konflik                      | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     |
| 16.                                          | Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup                             | Indeks Kualitas Air                                                          | Rumusan sasaran diubah; indikator disederhanakan              | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             |
|                                              |                                                                                                                                                | Indeks Kualitas Udara                                                        |                                                               |                                                      |                                                                              |
|                                              |                                                                                                                                                | Indeks Kualitas Tanah                                                        |                                                               |                                                      |                                                                              |
| 17.                                          | Menurunnya Angka Stunting                                                                                                                      | Persentase menurunnya angka stunting                                         | Rumusan sasaran dan indikator disempurnakan                   | Menurunnya stunting                                  | Angka Prevalensi Stunting                                                    |

| IKU pada RPD 2024-2026 (Sebelum Penyesuaian) |                                                                          |                                                                                                  | Penyesuaian                                              | IKU Sesudah Penyesuaian                                                    |                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| No.                                          | Sasaran                                                                  | Indikator                                                                                        |                                                          | Sasaran                                                                    | Indikator                        |
| 18.                                          | Menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim                       | Persentase menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim                                          | Rumusan sasaran dan indikator diubah                     | Menurunnya kemiskinan                                                      | Persentase penduduk miskin       |
| 19.                                          | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan  | Indeks Reformasi Birokrasi                                                                       | Rumusan sasaran diubah; indikator tetap                  | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi       |
| 20.                                          | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah                     | Nilai SAKIP                                                                                      | Rumusan sasaran diubah; indikator tetap                  | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                      |
| 21.                                          | Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Publik                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                                                 | Rumusan sasaran diubah; indikator tetap                  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| 22.                                          | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik             | Opini BPK                                                                                        | Rumusan sasaran diubah; indikator tetap                  | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                                   | Opini BPK                        |
| 23.                                          | Pengembangan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah           | PDRB sektor pertanian<br>PDRB sektor perikanan<br>PDRB sektor perkebunan                         | Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 7, 8 dan 9 |                                                                            |                                  |
| 24.                                          | Pengembangan akses infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN)         | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah                                    | Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 1          |                                                                            |                                  |
| 25.                                          | Pengembangan Industri dan Perdagangan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah<br>PDRB sektor perdagangan<br>PDRB sektor industri | Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 10         |                                                                            |                                  |

## 2.3 Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2025

Perencanaan Kinerja Tahun 2025 telah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara yang disusun berdasarkan target pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditandatangani oleh Bupati Barito Utara pada tanggal 12 Februari 2025.

Tabel 6.  
Perjanjian Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                    | Satuan      | Target    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | %           | 94,5      |
| 2.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | %           | 96,83     |
| 3.  | Menurunnya desa/kelurahan blankspot                             | Persentase desa/kelurahan blankspot                              | %           | 0         |
| 4.  | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                      | Rata-rata lama sekolah                                           | Tahun       | 8,62      |
|     |                                                                 | Angka melek huruf                                                | %           | 100       |
| 5.  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                       | Angka Harapan Hidup                                              | Tahun       | 71,33     |
| 6.  | Meningkatnya sektor pertanian                                   | PDRB sektor pertanian                                            | Juta rupiah | 731.789,1 |
| 7.  | Meningkatnya sektor perikanan                                   | PDRB sektor perikanan                                            | Juta rupiah | 202.562,4 |
| 8.  | Meningkatnya sektor perkebunan                                  | PDRB sektor perkebunan                                           | Juta rupiah | 406.575,4 |
| 9.  | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM                            | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah                    | Juta rupiah | 172.726,8 |
| 10. | Meningkatnya sektor perdagangan                                 | PDRB sektor perdagangan                                          | Juta rupiah | 789.585,9 |
| 11. | Meningkatnya sektor industri                                    | PDRB sektor industri                                             | Juta rupiah | 1.042.183 |
| 12. | Meningkatnya daya saing pariwisata                              | Persentase kunjungan wisata                                      | %           | 90        |
| 13. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                            | Angka pengangguran terbuka                                       | %           | 3,40      |
| 14. | Meningkatnya daya beli masyarakat                               | Pengeluaran perkapita pertahun                                   | Juta rupiah | 10.164    |

| No. | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                | Satuan               | Target  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 15. | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial                       | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | %                    | 22,36   |
| 16. | Meningkatnya ketertiban masyarakat                                         | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | %                    | 87,5    |
| 17. | Meningkatnya penanganan konflik                                            | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     | %                    | 80      |
| 18. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             | Nilai                | 73,68   |
| 19. | Menurunnya stunting                                                        | Angka Prevalensi Stunting                                                    | %                    | 16      |
| 20. | Menurunnya kemiskinan                                                      | Persentase penduduk miskin                                                   | %                    | 5,07    |
| 21. | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                                   | Kategori (nilai)     | B (61)  |
| 22. | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                                                                  | Kategori (nilai)     | B (67)  |
| 23. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                             | Predikat (nilai)     | B (78)  |
| 24. | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                                   | Opini BPK                                                                    | Predikat (opini ke-) | WTP (1) |

| No. | Program                                                                     | Anggaran            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | Program Penyelenggaraan Jalan                                               | Rp. 300.630.344.285 |
| 2.  | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                              | Rp 16.935.429.550   |
| 3.  | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                         | Rp. 16.043.019.100  |
| 4.  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                    | Rp. 24.619.527.000  |
| 5.  | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Rp. 259.447.879.038 |
| 6.  | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                    | Rp. 500.000.000     |
| 7.  | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra                                      | Rp. 115.000.000     |
| 8.  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | Rp. 77.602.668.903  |
| 9.  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rp. 419.211.000     |
| 10. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Rp. 766.797.000     |
| 11. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Rp. 409.666.750     |
| 12. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                       | Rp. 671.991.530     |
| 13. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                      | Rp. 3.463.174.240   |
| 14. | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                       | Rp. 312.817.975     |
| 15. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan                            | Rp. 417.514.100     |
| 16. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                        | Rp. 27.950.166.355  |

| No. | Program                                                                                                                                                                       | Anggaran          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 17. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.                                                                                                                    | Rp. 2.091.729.723 |
| 18. | Program Perizinan Usaha Pertanian.                                                                                                                                            | Rp. 545.151.486   |
| 19. | Program Penyuluhan Pertanian.                                                                                                                                                 | Rp. 1.179.996.950 |
| 20. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                                                                                     | 8.164.778.100     |
| 21. | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                      | Rp. 3.921.374.375 |
| 22. | Program Kawasan Permukiman                                                                                                                                                    | Rp. 2.722.660.000 |
| 23. | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                             | Rp. 3.378.763.480 |
| 24. | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                                                            | Rp. 2.047.430.000 |
| 25. | Program Pengembangan Ekspor                                                                                                                                                   | Rp. 1.292.100.750 |
| 26. | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                                                                                                                                | Rp. 325.194.350   |
| 27. | Program Perencanaan dan Pembangunan industri                                                                                                                                  | Rp. 686.976.550   |
| 28. | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                                                               | Rp. 151.317.000   |
| 29. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                                                                                | Rp. 442.556.000   |
| 30. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)                                                                                                       | Rp. 70.379.000    |
| 31. | Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Rp. 936.160.000   |
| 32. | Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Rp. 1.012.640.000 |
| 33. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                       | Rp. 300.000.000   |
| 34. | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 193.480.000   |
| 35. | Program Pembinaan Keluarga Berencana                                                                                                                                          | Rp. 1.697.860.000 |
| 36. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera                                                                                                                       | Rp. 1.656.303.750 |
| 37. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                                                                         | Rp. 144.145.900   |
| 38. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                                                                                                                               | Rp. 50.000.000    |
| 39. | Program Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                                                    | Rp. 140.000.000   |
| 40. | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                              | Rp. 145.000.000   |
| 41. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                          | Rp. 791.120.710   |
| 42. | Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                          | Rp. 3.930.572.500 |
| 43. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                     | Rp. 190.847.100   |
| 44. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                                                                      | Rp. 15.730.000    |
| 45. | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)                                                       | Rp. 368.906.000   |

| No. | Program                                                                                                       | Anggaran           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 46. | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Rp. 284.672.000    |
| 47. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                    | Rp. 279.952.000    |
| 48. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                         | Rp. 20.000.000     |
| 49. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                 | Rp. 222.947.000    |
| 50. | Program Pengelolaan Persampahan                                                                               | Rp. 10.964.270.000 |
| 51. | Program Pendaftaran Penduduk                                                                                  | Rp. 433.466.250    |
| 52. | Program Pencatatan Sipil                                                                                      | Rp. 394.562.250    |
| 53. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                       | Rp. 231.648.750    |
| 54. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                       | Rp. 38.000.000     |
| 55. | Program Pemasaran Pariwisata                                                                                  | Rp. 34.990.000     |
| 56. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                           | Rp. 2.964.621.000  |
| 57. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                          | 433.298.000        |
| 58. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                                        | Rp. 8.863.165.000  |
| 59. | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                               | Rp. 2.665.330.400  |
| 60. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                                     | Rp. 82.939.200     |
| 61. | Program Pengelolaan Permuseuman                                                                               | Rp. 20.150.000     |
| 62. | Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat                                                                   | Rp. 603.070.000    |
| 63. | Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan                                                                   | Rp. 389.399.000    |
| 64. | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                                                 | Rp. 393.000.000    |
| 65. | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                       | Rp. 787.230.000    |
| 66. | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                  | Rp. 2.673.017.850  |
| 67. | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                   | Rp. 3.055.590.000  |
| 68. | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                   | Rp. 3.639.548.600  |
| 69. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                       | Rp. 1.191.192.400  |
| 70. | Program Penanganan Bencana                                                                                    | Rp. 1.693.856.375  |
| 71. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.                                                  | Rp. 1.497.000.000  |
| 72. | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.                                                                | Rp. 2.311.882.750  |
| 73. | Program Perekonomian dan Pembangunan.                                                                         | Rp. 1.705.400.625  |
| 74. | Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam)                         | Rp. 400.000.000    |
| 75. | Program Kepegawaian Daerah                                                                                    | Rp. 20.512.339.750 |
| 76. | Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                    | Rp. 2.390.640.000  |
| 77. | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                                               | Rp. 851.564.000    |
| 78. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                             | Rp. 2.401.082.750  |
| 79. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                            | Rp. 1.779.476.000  |
| 80. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                           | Rp. 5.135.219.125  |
| 81. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                       | Rp. 1.092.620.675  |

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

##### 3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja utama (IKU) dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sehingga akan dikethui celah kinerja (*performance gap*) yang selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Untuk mengukur capaian kinerja untuk masing-masing indikator digunakan rumus:

1. Tingkat Realisasi Positif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Tingkat Realisasi Negatif:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Persentase capaian sasaran = rata-rata persentase capaian IKU

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:



| Rentang Capaian | Kategori Capaian   |
|-----------------|--------------------|
| >100%           | = Baik Sekali (BS) |
| >75% - 100%     | = Baik (B)         |
| 55% - 75%       | = Cukup (C)        |
| < 55%           | = Kurang (K)       |

### 3.1.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Pengukuran kinerja untuk masing-masing indikator kinerja tersaji sebagai berikut:

Tabel 7.

Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Utara Tahun 2025

| No. | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                    | Satuan      | Target    | Realisasi | Capaian (%) | Kategori    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | %           | 94,5      | 100       | 105,82      | Baik Sekali |
| 2.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | %           | 96,83     | 92,23     | 95,25       | Baik        |
| 3.  | Menurunnya desa/ kelurahan blankspot                            | Persentase desa/kelurahan blankspot                              | %           | 0         | 0         | 100,00      | Baik        |
| 4.  | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                      | Rata-rata lama sekolah                                           | Tahun       | 8,62      | 8,93      | 103,60      | Baik Sekali |
|     |                                                                 | Angka melek huruf                                                | %           | 100       | 99,36     | 99,36       | Baik        |
| 5.  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                       | Angka Harapan Hidup                                              | Tahun       | 71,33     | 73,75     | 103,39      | Baik Sekali |
| 6.  | Meningkatnya sektor pertanian                                   | PDRB sektor pertanian                                            | Juta rupiah | 731.789,1 | 707.332,6 | 96,66       | Baik        |
| 7.  | Meningkatnya sektor perikanan                                   | PDRB sektor perikanan                                            | Juta rupiah | 202.562,4 | 203.324,1 | 100,38      | Baik Sekali |
| 8.  | Meningkatnya sektor perkebunan                                  | PDRB sektor perkebunan                                           | Juta rupiah | 406.575,4 | 722.410,1 | 177,68      | Baik Sekali |
| 9.  | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM                            | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah                    | Juta rupiah | 172.726,8 | 188.312,6 | 109,02      | Baik Sekali |
| 10. | Meningkatnya sektor perdagangan                                 | PDRB sektor perdagangan                                          | Juta rupiah | 789.585,9 | 977.526,6 | 123,80      | Baik Sekali |

| No. | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                | Satuan               | Target    | Realisasi   | Capaian (%) | Kategori    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 11. | Meningkatnya sektor industri                                               | PDRB sektor industri                                                         | Juta rupiah          | 1.042.183 | 1.272.924,3 | 122,14      | Baik Sekali |
| 12. | Meningkatnya daya saing pariwisata                                         | Persentase kunjungan wisata                                                  | %                    | 90        | 91,94       | 102,16      | Baik Sekali |
| 13. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                                       | Angka pengangguran terbuka                                                   | %                    | 3,40      | 4,54        | 66,47       | Cukup       |
| 14. | Meningkatnya daya beli masyarakat                                          | Pengeluaran perkapita pertahun                                               | ribu/orang /tahun    | 10.164    | 11.534      | 113,48      | Baik Sekali |
| 15. | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial                       | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | %                    | 22,36     | 26,70       | 119,41      | Baik Sekali |
| 16. | Meningkatnya ketertiban masyarakat                                         | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | %                    | 87,5      | 100         | 114,29      | Baik Sekali |
| 17. | Meningkatnya penanganan konflik                                            | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     | %                    | 80        | 100         | 125,00      | Baik Sekali |
| 18. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             | Nilai                | 73,68     | 82,06       | 111,37      | Baik Sekali |
| 19. | Menurunnya stunting                                                        | Angka Prevalensi Stunting                                                    | %                    | 16        | 4,50        | 171,88      | Baik Sekali |
| 20. | Menurunnya kemiskinan                                                      | Persentase penduduk miskin                                                   | %                    | 5,07      | 5,52        | 91,12       | Baik        |
| 21. | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi                                                   | Kategori (nilai)     | B (61)    | BB (72,91)  | 119,52      | Baik Sekali |
| 22. | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                                                                  | Kategori (nilai)     | B (67)    | B (64,09)   | 98,60       | Baik        |
| 23. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                             | Predikat (nilai)     | B (78)    | B (84,17)   | 107,91      | Baik Sekali |
| 24. | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                                   | Opini BPK                                                                    | Predikat (opini ke-) | WTP (1)   | WDP (2)     | 75,00       | Cukup       |

### 3.1.3 Penjelasan/perhitungan realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025

Penjelasan/perhitungan realisasi dan capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 8.

Penjelasan/perhitungan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

| Indikator Kinerja Utama (IKU)                                       | Satuan | Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi                                                                                                                                             | Perhitungan Capaian (%)                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | %      | $\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ $\frac{103}{103} \times 100\% = 100\%$                                | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{100}{92,23} \times 100\% = 108,42\%$                                 |
| 2. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | %      | $\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung jaringan listrik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ $\frac{95}{103} \times 100\% = 92,23\%$                                   | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{92,23}{96,85} \times 100\% = 95,25\%$                                |
| 3. Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>                       | %      | $\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan blankspot}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ <p>Tahun 2025 seluruh desa/kelurahan berjumlah 103 sudah terbebas dari <i>blankspot</i> (0)</p> | <p>Desa/kelurahan yg blankspot ditargetkan 0 atau 100% bebas blankspot.</p> <p>Sehingga Capaian kinerja</p> $= 100\% - 0\% = 100\%$ |

| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan      | Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi                                                                                                                                                                                      | Perhitungan Capaian (%)                                                                               |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Rata-rata lama sekolah     | Tahun       | Perhitungan Rata-rata lama sekolah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.<br><br>Data BPS, RLS Barut Tahun 2025 = 8,93 tahun                                                                                                       | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{8,93}{8,62} \times 100\% = 103,60\%$          |
| 5. Angka Melek Huruf          | %           | Perhitungan Angka Melek Huruf dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.<br><br>Data BPS, Angka Melek Huruf Barut Tahun 2025 = 99,36%                                                                                                  | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{99,36}{100} \times 100\% = 99,39\%$           |
| 6. Angka Harapan Hidup        | Tahun       | Perhitungan Angka Harapan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.<br><br>Data BPS Tahun 2025 = 73,75 tahun                                                                                                                    | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{73,75}{71,33} \times 100\% = 103,39\%$        |
| 7. PDRB sektor pertanian      | Juta rupiah | Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2025. Dalam perhitungan termasuk kehutanan dan penebangan kayu namun tidak termasuk perkebunan dan perikanan.<br><br>PDRB sektor pertanian tahun 2025 = 707.332,6 juta rupiah | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{707.332,6}{731.789,1} \times 100\% = 96,66\%$ |

| Indikator Kinerja Utama (IKU)                     | Satuan      | Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi                                                                                                                                                                          | Perhitungan Capaian (%)                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. PDRB sektor perikanan                          | Juta rupiah | Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2025.<br><br>PDRB sektor perikanan tahun 2025 = 203.324,1 juta rupiah                                                                                             | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{203.324,1}{202.562,4} \times 100\% = 100,38\%$ |
| 9. PDRB sektor perkebunan                         | Juta rupiah | Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2025.<br><br>PDRB sektor perkebunan tahun 2025 = 722.410,1 juta rupiah                                                                                            | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{722.410,1}{406.575,4} \times 100\% = 177,68\%$ |
| 10. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah | Juta rupiah | Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2025. Dalam perhitungan termasuk jasa perantara keuangan.<br><br>PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah tahun 2025 = 188.312,6 juta rupiah                 | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{188.312,6}{172.726,8} \times 100\% = 109,02\%$ |
| 11. PDRB sektor perdagangan                       | Juta rupiah | Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2025. Dalam perhitungan meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.<br><br>PDRB sektor perdagangan tahun 2025 = 977.526,6 juta rupiah | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{977.526,6}{789.585,9} \times 100\% = 123,80\%$ |

| Indikator Kinerja Utama (IKU)      | Satuan           | Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi                                                                                                                               | Perhitungan Capaian (%)                                                                                                         |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. PDRB sektor industri           | Juta rupiah      | Perhitungan PDRB dilaksanakan oleh BPS dan rilis tahun 2025. Dalam perhitungan meliputi industri pengolahan.<br><br>PDRB sektor industri tahun 2025 = 1.272.924,3 juta rupiah | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{1.272.924,3}{1.042.183} \times 100\% = 122,14\%$                        |
| 13. Persentase kunjungan wisata    | %                | $\frac{Jumlah\ realisasi\ kunjungan\ wisata}{Jumlah\ kunjungan\ wisata\ yang\ direncanakan} \times 100\%$<br><br>$\frac{101.134}{110.000} \times 100\% = 91,94\%$             | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{91,94}{90} \times 100\% = 102,16\%$                                     |
| 14. Angka Pengangguran Terbuka     | %                | Perhitungan Angka Pengangguran Terbuka dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.<br><br>Data BPS Tahun 2025 = 4,54%                                                            | $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{3,40 - (4,54 - 3,40)}{3,40} \times 100\% = 66,47\%$ |
| 15. Pengeluaran perkapita pertahun | Ribu/orang/tahun | Perhitungan Pengeluaran perkapita dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.<br><br>Data BPS Tahun 2025 = 11.534                                                                | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{11.534}{10.164} \times 100\% = 113,48\%$                                |
| 16. Persentase PMKS yang mandiri   | %                | $\frac{Jumlah\ PMKS\ yang\ mandiri}{Jumlah\ PMKS\ yang\ ditangani} \times 100\%$<br><br>$= \frac{2.551}{9.553} \times 100\% = 26,70\%$                                        | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{25,06}{22,36} \times 100\% = 119,41\%$                                  |

| Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                    | Satuan | Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Perhitungan Capaian (%)                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | %      | $\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi}} \times 100\%$ $= \frac{281 \text{ pelanggaran}}{281 \text{ pelanggaran}} \times 100\% = 100\%$                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{100}{87,5} \times 100\% = 114,29\%$    |
| 18. Persentase kasus konflik yang tertangani                                     | %      | $\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus konflik sosial}} \times 100\%$ $= \frac{15 \text{ kasus}}{15 \text{ kasus}} \times 100\% = 100\%$                                                                                                                                                                                                     | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{100}{80} \times 100\% = 125\%$         |
| 19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             | nilai  | Data Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025:<br>Indeks Kualitas Air (IKA) = 75,83<br>Indeks Kualitas Udara (IKU) = 86,62<br>Indeks Kualitas Lahan (IKL) = 84,31<br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :<br>$(0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ $= (0,376 \times 75,83) + (0,405 \times 86,62) + (0,219 \times 84,31) = 82,06$ | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{82,06}{73,68} \times 100\% = 111,37\%$ |
| 20. Angka Prevalensi Stunting                                                    | %      | Data e-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) Kemenkes Tahun 2025.<br><br>Angka Prevalensi Stunting Barito Utara Tahun 2025 = 4,50%                                                                                                                                                                                                             | $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$ $= \frac{4,50}{16} \times 100\% = 171,88\%$     |

| Indikator Kinerja Utama (IKU)  | Satuan           | Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Perhitungan Capaian (%)                                                                              |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Persentase penduduk miskin | %                | Perhitungan persentase penduduk miskin dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.<br><br>Data Juli 2025 = 5,52%                                                                                                                                                                                                                     | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$\frac{5,52}{5,07} \times 100\% = 91,12\%$            |
| 22. Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori (Nilai) | Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Barito Utara sesuai Hasil evaluasi RB pada portal RB Nasional<br><br>Hasil Evaluasi tahun 2025 = BB (72,91)                                                                                                                                                                             | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{BB (72,91)}{B (61)} \times 100\% = 119,52\%$ |
| 23. Nilai SAKIP                | Predikat (Nilai) | Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Utara sesuai Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/93/AA.05/2025 Tanggal 25 Desember 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.<br><br>Hasil Evaluasi Tahun 2025 = 64,09 (B) | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$<br><br>$= \frac{B (64,09)}{B (67)} \times 100\% = 98,60\%$   |



| Indikator Kinerja Utama (IKU)        | Satuan               | Penjelasan Perhitungan/Perolehan Data Realisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Perhitungan Capaian (%)                                                                         |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Predikat (Nilai)     | <p>Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>Hasil SKM tahun 2025, indeks kepuasan masyarakat B (84,17)</p>                                                                      | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{B (84,17)}{B (78,00)} \times 100\% = 107,91\%$ |
| 25. Opini BPK                        | Predikat (Opini ke-) | <p>Penilaian opini yang di keluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah.</p> <p>Hasil evaluasi 2025 terhadap laporan keuangan tahun 2024, Pemerintah Kab. Barito Utara memperoleh opini WDP</p> <p>Tingkatan opini BPK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. WTP (100)</li> <li>2. WDP (75)</li> <li>3. TW (50)</li> <li>4. TMP (25)</li> </ol> | $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$ $= \frac{WDP (75)}{WTP (100)} \times 100\% = 75\%$      |

### 3.1.4 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

Persentase Pencapaian sasaran strategis merupakan rata-rata persentase pencapaian indikator kinerja utama (IKU) untuk masing-masing sasaran tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 9.  
Capaian Sasaran Strategis Tahun 2025

| No. | Sasaran                                                         | Capaian (%) | Kategori    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1   | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | 105,82      | Baik Sekali |
| 2   | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | 95,25       | Baik        |
| 3   | Menurunnya desa/ kelurahan blankspot                            | 100,00      | Baik        |
| 4   | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                      | 101,48      | Baik Sekali |
| 5   | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.                      | 103,39      | Baik Sekali |
| 6   | Meningkatnya sektor pertanian                                   | 96,66       | Baik        |
| 7   | Meningkatnya sektor perikanan                                   | 100,38      | Baik Sekali |
| 8   | Meningkatnya sektor perkebunan                                  | 177,68      | Baik Sekali |
| 9   | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM                            | 109,02      | Baik Sekali |
| 10  | Meningkatnya sektor perdagangan                                 | 123,80      | Baik Sekali |
| 11  | Meningkatnya sektor industri                                    | 122,14      | Baik Sekali |
| 12  | Meningkatnya daya saing pariwisata                              | 102,16      | Baik Sekali |
| 13  | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                            | 66,47       | Cukup       |
| 14  | Meningkatnya daya beli masyarakat                               | 113,48      | Baik Sekali |

| No.              | Sasaran                                                                    | Capaian (%)   | Kategori           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 15               | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial                       | 119,41        | Baik Sekali        |
| 16               | Meningkatnya ketertiban masyarakat                                         | 114,29        | Baik Sekali        |
| 17               | Meningkatnya penanganan konflik                                            | 125,00        | Baik Sekali        |
| 18               | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                     | 111,37        | Baik Sekali        |
| 19               | Menurunnya stunting                                                        | 171,88        | Baik Sekali        |
| 20               | Menurunnya kemiskinan                                                      | 91,12         | Baik               |
| 21               | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | 119,52        | Baik Sekali        |
| 22               | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 98,60         | Baik               |
| 23               | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | 107,91        | Baik Sekali        |
| 24               | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                                   | 75,00         | Cukup              |
| <b>Rata-rata</b> |                                                                            | <b>110,49</b> | <b>Baik Sekali</b> |

Capaian kinerja untuk sasaran strategis, dari 24 (dua puluh empat) sasaran strategis, 2 sasaran strategis atau 8,33% dengan kategori Cukup, 5 sasaran atau 20,83% dengan kategori Baik dan 17 sasaran strategis atau 70,83% dengan kategori capaian Baik Sekali.

Dari 24 Sasaran strategis, 19 Sasaran dapat terealisasi dengan capaian 100% atau lebih dan 5 sasaran strategis dengan capaian di bawah 100%.

### 2.1.5 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan kinerja tahun 2024 dengan 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 10.  
Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan 2025

| Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                    | Satuan      | Tahun 2024 |            |             | Tahun 2025 |            |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|                                                                    |                                                                  |             | Target     | Realisasi  | Capaian (%) | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |
| 1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | %           | 92,23      | 100        | 108,42      | 94,5       | 100        | 105,82      |
| 2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | %           | 95,15      | 88,35      | 92,85       | 96,83      | 92,23      | 95,25       |
| 3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot                             | Persentase desa/kelurahan blankspot                              | %           | 0,00       | 0,00       | 100         | 0          | 0          | 100,00      |
| 4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                      | Rata-rata lama sekolah                                           | Tahun       | 8,61       | 8,92       | 103,60      | 8,62       | 8,93       | 103,60      |
|                                                                    | Angka melek huruf                                                | %           | 99,7       | 98,77      | 99,07       | 100        | 99,36      | 99,36       |
| 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                       | Angka Harapan Hidup                                              | Tahun       | 71,32      | 73,65      | 103,27      | 71,33      | 73,75      | 103,39      |
| 6. Meningkatnya sektor pertanian                                   | PDRB sektor pertanian                                            | Juta rupiah | 672.597,9  | 631.270,40 | 93,86       | 731.789,10 | 707.332,60 | 96,66       |
| 7. Meningkatnya sektor perikanan                                   | PDRB sektor perikanan                                            | Juta rupiah | 191.262,8  | 197.131,50 | 103,07      | 202.562,40 | 203.324,10 | 100,38      |

| Sasaran Strategis                                        | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                | Satuan           | Tahun 2024 |              |             | Tahun 2025 |              |             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|
|                                                          |                                                                              |                  | Target     | Realisasi    | Capaian (%) | Target     | Realisasi    | Capaian (%) |
| 8. Meningkatnya sektor perkebunan                        | PDRB sektor perkebunan                                                       | Juta rupiah      | 397.068,6  | 658.461,10   | 165,83      | 406.575,40 | 722.410,10   | 177,68      |
| 9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM                  | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah                                | Juta rupiah      | 160.676,1  | 177.560,10   | 110,51      | 172.726,80 | 188.312,60   | 109,02      |
| 10. Meningkatnya sektor perdagangan                      | PDRB sektor perdagangan                                                      | Juta rupiah      | 750.936,7  | 915.050,70   | 121,85      | 789.585,90 | 977.526,60   | 123,80      |
| 11. Meningkatnya sektor industri                         | PDRB sektor industri                                                         | Juta rupiah      | 986.408,6  | 1.195.925,90 | 121,24      | 1.042.183  | 1.272.924,30 | 122,14      |
| 12. Meningkatnya daya saing pariwisata                   | Persentase kunjungan wisata                                                  | %                | 80         | 80,62        | 100,78      | 90         | 91,94        | 102,16      |
| 13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                 | Angka pengangguran terbuka                                                   | %                | 3,43       | 4,71         | 62,68       | 3,4        | 4,54         | 66,47       |
| 14. Meningkatnya daya beli masyarakat                    | Pengeluaran perkapita pertahun                                               | ribu/orang/tahun | 9.993      | 11.150       | 111,58      | 10.164     | 11.534       | 113,48      |
| 15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | %                | 22,05      | 25,06        | 113,65      | 22,36      | 26,7         | 119,41      |
| 16. Meningkatnya ketertiban masyarakat                   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | %                | 87,5       | 100          | 114,29      | 87,5       | 100          | 114,29      |

| Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja Utama (IKU)            | Satuan               | Tahun 2024 |           |             | Tahun 2025 |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
|                                                                                |                                          |                      | Target     | Realisasi | Capaian (%) | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |
| 17. Meningkatnya penanganan konflik                                            | Persentase kasus konflik yang tertangani | %                    | 80         | 100       | 125,00      | 80         | 100        | 125,00      |
| 18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup         | Nilai                | 73,64      | 75,59     | 102,65      | 73,68      | 82,06      | 111,37      |
| 19. Menurunnya stunting                                                        | Angka Prevalensi Stunting                | %                    | 16,21      | 15,3      | 94,39       | 16         | 4,5        | 171,88      |
| 20. Menurunnya kemiskinan                                                      | Persentase penduduk miskin               | %                    | 5,08       | 5,67      | 88,39       | 5,07       | 5,52       | 91,12       |
| 21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi               | Kategori (nilai)     | B (60,01)  | B (66,89) | 115,80      | B (61)     | BB (72,91) | 119,52      |
| 22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                              | Kategori (nilai)     | B (65)     | B (63,74) | 98,06       | B (65)     | B (64,09)  | 98,60       |
| 23. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)         | Predikat (nilai)     | B (77)     | B (86,36) | 112,16      | B (78)     | B (84,17)  | 107,91      |
| 24. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                                   | Opini BPK                                | Predikat (opini ke-) | WTP (1)    | WTP (1)   | 100,00      | WTP (1)    | WDP (2)    | 75,00       |

Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 110,49% atau dalam kategori Baik Sekali. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 106,52% namun masih dalam kategori yang sama.

### 2.1.6 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam RPD 2024-2026

Perbandingan realisasi dan target kinerja yang terdapat dalam RPD Kabupaten Barito Utara 2024-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 11.  
Perbandingan Kinerja Tahun 2025 dengan Target pada RPD 2024-2026

| Indikator Kinerja Utama                                             | Satuan      | 2024      |              |             | 2025       |              |             | 2026 (Akhir) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
|                                                                     |             | Target    | Realisasi    | Capaian (%) | Target     | Realisasi    | Capaian (%) | Target       |
| 1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | %           | 92,23     | 100          | 108,42      | 94,5       | 100          | 105,82      | 97,73        |
| 2. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | %           | 95,15     | 88,35        | 92,85       | 96,83      | 92,23        | 95,25       | 99,12        |
| 3. Persentase desa/kelurahan blankspot                              | %           | 0,00      | 0,00         | 100         | 0          | 0            | 100,00      | 0,00         |
| 4. Rata-rata lama sekolah                                           | Tahun       | 8,61      | 8,92         | 103,60      | 8,62       | 8,93         | 103,60      | 8,63         |
| 5. Angka melek huruf                                                | %           | 99,70     | 98,77        | 99,07       | 100        | 99,36        | 99,36       | 100          |
| 6. Angka Harapan Hidup                                              | Tahun       | 71,32     | 73,65        | 103,27      | 71,33      | 73,75        | 103,39      | 71,34        |
| 7. PDRB sektor pertanian                                            | Juta rupiah | 672.597,9 | 631.270,40   | 93,86       | 731.789,10 | 707.332,60   | 96,66       | 796.189,3    |
| 8. PDRB sektor perikanan                                            | Juta rupiah | 191.262,8 | 197.131,50   | 103,07      | 202.562,40 | 203.324,10   | 100,38      | 214.529,5    |
| 9. PDRB sektor perkebunan                                           | Juta rupiah | 397.068,6 | 658.461,10   | 165,83      | 406.575,40 | 722.410,10   | 177,68      | 416.309,8    |
| 10. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah                   | Juta rupiah | 160.676,1 | 177.560,10   | 110,51      | 172.726,80 | 188.312,60   | 109,02      | 185.681,3    |
| 11. PDRB sektor perdagangan                                         | Juta rupiah | 750.936,7 | 915.050,70   | 121,85      | 789.585,90 | 977.526,60   | 123,80      | 830.224,3    |
| 12. PDRB sektor industri                                            | Juta rupiah | 986.408,6 | 1.195.925,90 | 121,24      | 1.042.183  | 1.272.924,30 | 122,14      | 1.101.111    |
| 13. Persentase kunjungan wisata                                     | %           | 80        | 80,62        | 100,77      | 90         | 91,94        | 102,16      | 95           |

| Indikator Kinerja Utama                                                          | Satuan               | 2024      |           |             | 2025    |            |             | 2026 (Akhir) |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
|                                                                                  |                      | Target    | Realisasi | Capaian (%) | Target  | Realisasi  | Capaian (%) | Target       |
| 14. Angka pengangguran terbuka                                                   | %                    | 3,43      | 4,71      | 62,68       | 3,4     | 4,54       | 66,47       | 3,37         |
| 15. Pengeluaran perkapita pertahun                                               | ribu/orang/tahun     | 9.993     | 11.150    | 111,58      | 10.164  | 11.534     | 113,48      | 10.339       |
| 16. Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | %                    | 22,05     | 25,06     | 113,65      | 22,36   | 26,7       | 119,41      | 22,67        |
| 17. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | %                    | 87,5      | 100       | 114,29      | 87,5    | 100        | 114,29      | 87,5         |
| 18. Persentase kasus konflik yang tertangani                                     | %                    | 80        | 100       | 125,00      | 80      | 100        | 125,00      | 80           |
| 19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             | Nilai                | 73,64     | 75,59     | 102,65      | 73,68   | 82,06      | 111,37      | 73,73        |
| 20. Angka Prevalensi Stunting                                                    | %                    | 16,21     | 15,3      | 105,61      | 16      | 4,5        | 171,88      | 15,8         |
| 21. Persentase penduduk miskin                                                   | %                    | 5,08      | 5,67      | 88,39       | 5,07    | 5,52       | 91,12       | 5,05         |
| 22. Indeks Reformasi Birokrasi                                                   | Kategori (nilai)     | B (60,01) | B (69,07) | 115,10      | B (61)  | BB (72,91) | 119,52      | B (65)       |
| 23. Nilai SAKIP                                                                  | Kategori (nilai)     | B (65)    | B (63,74) | 98,06       | B (65)  | B (64,09)  | 98,60       | B (69)       |
| 24. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                             | Predikat (nilai)     | B (77)    | B (86,36) | 112,16      | B (78)  | B (84,17)  | 107,91      | B (79)       |
| 25. Opini BPK                                                                    | Predikat (opini ke-) | WTP (1)   | WTP (1)   | 100,00      | WTP (1) | WDP (2)    | 75,00       | WTP (1)      |



### 2.1.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan provinsi dan nasional

Beberapa realisasi indikator kinerja Kabupaten Barito Utara yang bisa diperbandingkan dengan angka Provinsi Kalimantan Tengah maupun nasional sesuai data yang tersedia antara lain:

Tabel 12.  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Provinsi dan Nasional

| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Satuan               | Realisasi Tahun 2025   |                            |          |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------|
|                               |                      | Kabupaten Barito Utara | Provinsi Kalimantan Tengah | Nasional |
| Rata-rata lama sekolah        | Tahun                | 8,93                   | 8,96                       | 9,07     |
| Angka Melek Huruf             | %                    | 99,36                  | 99,84                      | 99,83    |
| Angka Harapan Hidup           | Tahun                | 73,75                  | 74,01                      | 74,47    |
| Pengeluaran Perkapita         | ribu/orang/<br>tahun | 11.534                 | 12.612                     | 12.802   |
| Angka Pengangguran Terbuka    | %                    | 4,54                   | 3,97                       | 4,85     |
| Angka Prevalensi Stunting     | %                    | 4,50                   | 20,6                       | 19,8     |
| Persentase Penduduk Miskin    | %                    | 5,52                   | 4,94                       | 8,25     |
| Nilai SAKIP                   | nilai                | 64,09                  | -                          | 64,89    |

## 2.2. Analisa Capaian Kinerja

### 2.2.1 Analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja tahun 2025 dan langkah perbaikan/solusi

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dan alternatif solusi perbaikan bagi target yang tidak tercapai sebagai berikut.

Tabel 13.

Analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja tahun 2025 serta langkah perbaikan/solusi

| Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                    | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | 105,82%<br>(Baik Sekali)        | <p><b><u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan yang matang dalam pembukaan akses darat di beberapa lokasi yang telah ditentukan dimana perencanaan sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya (N-1).</li> <li>2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk mengeksekusi perencanaan yang dibuat.</li> <li>3) Terpeliharanya kondisi jalan dan jembatan penghubung yang telah ada sebelumnya dalam kondisi baik dan fungsional.</li> </ol>                                                                                                                      |
| 2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | 95,25%<br>(Baik)                | <p><b><u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Faktor geografis yang menyulitkan pemasangan tiang jaringan.</li> <li>2) Kendala pembebasan jalan (row) pembangunan jaringan listrik.</li> </ol> <p><b><u>Langkah perbaikan/Solusi:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan dukungan dan koordinasi dengan PLN dalam rangka penanganan permasalahan pembangunan jaringan listrik berkaitan masalah pembebasan jalan (row) dengan memediasi pertemuan antara warga beserta dengan perwakilan dari PLN. Telah dibentuk tim</li> </ol> |

| Sasaran Strategis                             | Indikator Kinerja Utama (IKU)              | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                            |                                 | terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan permasalahan pembebasan lahan.<br>2) Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama dalam pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.             |
| 3. Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i> | Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i> | 100%<br>(Baik)                  | <b><u>Faktor Penyebab Keberhasilan:</u></b><br>1) Berjalannya pembangunan menara BTS baru yang berhasil mengcover beberapa area desa blankspot<br>2) koordinasi dengan BP3TI Kementerian Komunikasi dan Informatika RI selaku yang berwenang dalam program pemasangan BTS.<br>3) Berjalannya penyediaan internet desa              |
| 4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat | Rata-rata lama sekolah                     | 103,60%<br>(Baik Sekali)        | <b><u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u></b><br>1) Meningkatnya kesadaran akan wajib belajar sembilan tahun.<br>2) Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah serta semakin terbukanya akses pendidikan tinggi.<br>3) Berjalannya program dan kegiatan untuk peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar. |
|                                               | Angka Melek Huruf                          | 99,36%<br>(Baik)                | <b><u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u></b><br>1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan.<br>2) Tingkat gengsi yang masih tinggi sehingga untuk memenuhi pendidikan penyelesaian buta aksara terabaikan.                                                                                           |

| Sasaran Strategis                             | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                               |                                 | <p>3) Kurangnya motivasi untuk mengikuti paket A dan B masih sangat rendah, terutama yang berdomisili pada pedalaman atau perkampungan yang jauh selain itu faktor pekerjaan atau mata pencarian seperti pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan.</p> <p><b><u>Langkah perbaikan/Solusi:</u></b></p> <p>1) Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan intensif kepada kelompok masyarakat tentang pentingnya Pendidikan.</p> <p>2) Melaksanakan kampanye dan pembudayaan gemar membaca sampai ke tingkat desa.</p> <p>3) Meningkatkan pembinaan kepada lembaga non formal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.</p> |
| 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. | Angka Harapan Hidup           | 103,39%<br>(Baik Sekali)        | <p><b><u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u></b></p> <p>1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam praktik pola hidup sehat seiring dengan gencarnya kampanye Gerakan Kesehatan Masyarakat (GERMAS).</p> <p>2) Semakin baiknya pemberian layanan pada fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan baiknya hasil survei kepuasan masyarakat pengguna layanan kesehatan di Barito Utara.</p> <p>3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan terutama dengan semakin meningkatnya pembangunan RSUD Muara Teweh serta peningkatan kualitas puskesmas.</p>                                                                      |
| 6. Meningkatnya sektor pertanian              | PDRB sektor pertanian         | 96,66%<br>(Baik)                | <p><b><u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u></b></p> <p>1) Tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sasaran Strategis                | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                               |                                 | <p>2) Terjadinya serangan hama pada sebagian wilayah yang membuat produksi tidak maksimal.</p> <p><b><u>Langkah perbaikan/Solusi:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil pertanian.</li> <li>2) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.</li> <li>3) Penguatan kelembagaan Petani melalui bimbingan dan sosialisasi mengenai penggunaan varietas unggul, pemberian pupuk sesuai rekomendasi, optimalisasi lahan, dan pengendalian hama penyakit.</li> <li>4) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan.</li> </ol>                                                 |
| 7. Meningkatnya sektor perikanan | PDRB sektor perikanan         | 100,38%<br>(Baik Sekali)        | <p><b><u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya jumlah produksi perikanan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya khususnya pada perikanan budidaya.</li> <li>2) Optimalnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.</li> <li>3) Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat (nelayan dan pembudidaya ikan).</li> <li>4) Pembinaan terhadap kelompok nelayan di wilayah Kabupaten Barito Utara terlaksana dengan baik.</li> <li>5) Angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat yang didorong oleh pencanangan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan).</li> </ol> |

| Sasaran Strategis                       | Indikator Kinerja Utama (IKU)                 | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Meningkatnya sektor perkebunan       | PDRB sektor perkebunan                        | 177,68%<br>(Baik Sekali)        | <p><b>Faktor Penyebab keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Produksi perkebunan meningkat dan mampu mencapai target yang ditetapkan terutama untuk komoditas besar seperti sawit, karet dan kakao.</li> <li>2) Adanya perbaikan harga beberapa komoditas perkebunan unggulan seperti karet dan kakao.</li> <li>3) Gencarnya sosialisasi dan bimbingan teknis budidaya, pemberian bibit unggul, pemberian pupuk sesuai rekomendasi, cara perawatan dan pemeliharaan tanaman perkebunan, cara panen/penyadapan yang baik dan benar, serta pengendalian hama dan penyakit.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah | 109,02%<br>(Baik Sekali)        | <p><b>Faktor Penyebab keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Semakin meningkatnya koperasi yang aktif dan koperasi yang sehat di Kabupaten Barito Utara.</li> <li>2) Semakin meningkatnya usaha kecil dan menengah yang produktif.</li> <li>3) Adanya pembinaan yang dilakukan secara bertahap terhadap pelaku UKM dengan meningkatkan jumlah usaha mikro kecil, dan jumlah seluruh UKM yang dibina serta memonitoring ijin usaha mikro kecil bagi para pelaku UKM.</li> <li>4) Adanya program pengembangan dan pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah pada kegiatan pengembangan sarana promosi hasil produksi dilakukan dengan mengembangkan usaha para pelaku UKM melalui promosi dengan memanfaatkan media online, sosial media dan lainnya.</li> <li>5) Meningkatnya akses pembiayaan/permodalan bagi UKM.</li> </ol> |

| Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Meningkatnya sektor perdagangan    | PDRB sektor perdagangan       | 123,80%<br>(Baik Sekali)        | <b>Faktor Penyebab keberhasilan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lancarnya distribusi barang dan jasa melalui peningkatan sarana distribusi perdagangan.</li> <li>2) Adanya penguatan institusi pasar yang dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan dan renovasi pasar.</li> <li>3) Semakin meningkatnya aktivitas usaha masyarakat pada sektor perdagangan selama tahun 2025.</li> </ol>                                                                                                                                                 |
| 11. Meningkatnya sektor industri       | PDRB sektor industri          | 122,14%<br>(Baik Sekali)        | <b>Faktor Penyebab keberhasilan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya nilai aset dan nilai produksi industri di Kabupaten Barito Utara.</li> <li>2) Meningkatnya jumlah perusahaan industri kecil dibandingkan tahun sebelumnya terutama dari jenis industri kerajinan/<i>craft industry</i>.</li> <li>3) Tumbuhnya industri pengolahan pangan di Kabupaten Barito Utara.</li> </ol>                                                                                                                                               |
| 12. Meningkatnya daya saing pariwisata | Persentase kunjungan wisata   | 102,16%<br>(Baik Sekali)        | <b>Faktor Penyebab keberhasilan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya pengelolaan objek wisata terutama objek wisata unggulan di Barito Utara.</li> <li>2) Meningkatnya promosi wisata yang masif dan efektif melalui media sosial, pelaksanaan pagelaran seni budaya dan atraksi budaya virtual dengan latar belakang objek wisata unggulan.</li> <li>3) Meningkatnya akses menuju objek wisata dengan pembukaan dan perbaikan akses jalan.</li> <li>4) Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung pada objek wisata.</li> </ol> |

| Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja Utama (IKU)  | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | Angka pengangguran terbuka     | 66,47%<br>(Cukup)               | <p><b><u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja yang cenderung meningkat namun pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai dengan kondisi tersebut.</li> <li>2) Nilai investasi di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan tetapi masih belum mencapai target yang ditetapkan.</li> </ol> <p><b><u>Langkah perbaikan/Solusi:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan Pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui penyebarluasan informasi tenaga kerja.</li> <li>2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.</li> <li>3) Meningkatkan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan</li> <li>4) Meningkatkan iklim investasi dan realisasi Investasi untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Barito Utara melalui promosi, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>5) Peningkatan program untuk menciptakan wirausahawan baru.</li> </ol> |
| 14. Meningkatnya daya beli masyarakat    | Pengeluaran perkapita pertahun | 113,48%<br>(Baik sekali)        | <p><b><u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Semakin membaiknya kegiatan usaha masyarakat terutama sektor UKM</li> <li>2) Meningkatnya pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah yang produktif.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Sasaran Strategis                                        | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                              |                                 | 3) Pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan turut menciptakan lapangan pekerjaan di desa sehingga meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pedesaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | 119,41%<br>(Baik Sekali)        | <b>Faktor Penyebab keberhasilan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang standar teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial.</li> <li>2) Program prioritas daerah berupa program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS yang mampu dijalankan dengan baik melalui sinergi beberapa perangkat daerah.</li> <li>3) Adanya fokus yang dilakukan pemerintah bersama Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) melalui upaya penanganan dan pembinaan khususnya bagi masyarakat yang tergolong miskin agar lebih mandiri dan memiliki usaha sendiri.</li> <li>4) Adanya dukungan sarana prasarana pelayanan Sosial dan sumber daya manusia penyelenggara pelayanan sosial.</li> </ol> |
| 16. Meningkatnya ketertiban masyarakat                   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | 114,29%<br>(Baik Sekali)        | <b>Faktor Penyebab keberhasilan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terlaksana dengan baik.</li> <li>2) Penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berjalan dengan baik.</li> <li>3) Patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh daerah.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Sasaran Strategis                   | Indikator Kinerja Utama (IKU)          | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                        |                                 | 4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah kepada seluruh masyarakat di daerah berjalan dengan efektif.<br>5) Penegakan atas pelanggaran pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17. Meningkatnya penanganan konflik | Persentase Penyelesaian Konflik Sosial | 125%<br>(Baik Sekali)           | <p><b><u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u></b></p> 1) Peran serta Tim Kewaspadaan Dini dan Tim Konflik Sosial yang mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah. Dalam rangka mendukung tim kewaspadaan dini telah dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) untuk memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat berbagai kegiatan pemerintah daerah dan laporan tentang kondusivitas wilayah.<br>2) Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, antara lain: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forkopimda dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Keberadaan forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di wilayah Kabupaten Barito Utara. |

| Sasaran Strategis                          | Indikator Kinerja Utama (IKU)    | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                  |                                 | <p>3) Terjalannya koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda dalam rangka melakukan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.</p> <p>4) Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu penanganan konflik sosial di kabupaten Barito Utara Tahun 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 111,37%<br>(Baik Sekali)        | <p><b>Faktor Penyebab keberhasilan:</b></p> <p>1) Program dan kegiatan dalam rangka pengendalian pencemaran Air dapat berjalan efektif untuk menurunkan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air. Untuk Pengambilan sampel air dilakukan pada 3 Sungai seperti Sungai Lahei, Sungai Teweh dan Sungai Montalat. Untuk pengambilan sampel air dilakukan setiap masing-masing sungai diambil sampel bagian hulu, Bagian Tengah, dan Bagian hilir.</p> <p>2) Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi ketentuan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tetap terlaksana dengan baik.</p> <p>3) Aktivitas pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair dan B3 bertambah selama tahun 2025, akan tetapi para Pelaku Usaha dan/atau kegiatan tetap taat dalam menangani limbah sesuai dengan aturan perizinan yang diberikan.</p> <p>4) Menurunnya atau berkurangnya kejadian kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan turunnya kualitas udara.</p> |

| Sasaran Strategis         | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                               |                                 | 5) Program dan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sudah berjalan maksimal karena ada beberapa kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dalam Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19. Menurunnya stunting   | Angka Prevalensi Stunting     | 171,88%<br>(Baik sekali)        | <b><u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u></b><br>1) Berjalannya pendampingan calon pengantin, pendampingan ibu hamil, pendampingan Ibu pasca bersalin, dan pendampingan anak usia 0 sampai dengan 59 bulan.<br>2) Terlaksananya deteksi dini stunting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20. Menurunnya kemiskinan | Persentase penduduk miskin    | 91,12%<br>(Baik)                | <b><u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u></b><br>Terbatasnya infrastruktur jalan dan energi listrik di beberapa desa di wilayah kabupaten barito utara sehingga sangat berdampak terhadap akses pertumbuhan hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain.<br><br><b><u>Langkah perbaikan/Solusi:</u></b><br>1) Mengkoordinasikan dan mensinkronkan program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah serta mengupayakan pengurangan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Barito Utara<br>2) Memperkuat sinergi dengan pihak swasta guna peningkatan kualitas SDM dan mendorong pembangunan di desa-desa terpencil<br>3) Meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian infrastruktur jalan dalam rangka mempermudah akses pendirian jaringan PLN desa |

| Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi    | 119,52%<br>(Baik Sekali)        | <p><b><u>Faktor Penyebab keberhasilan:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersusunnya rencana aksi RB transisi tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari perbaikan tahun sebelumnya.</li> <li>2) Meningkatnya implementasi ASN BerAKHLAK.</li> <li>3) Penerapan tata kelola SPBE mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.</li> <li>4) Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.</li> <li>5) Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.</li> <li>6) Perbaikan dalam pengelolaan arsip dan pemanfaatan arsip digital.</li> <li>7) Terlaksananya pengukuran kualitas kebijakan</li> <li>8) Terlaksananya rencana aksi RB tahun 2025.</li> </ol>                                                                                |
| 22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                   | 98,60%<br>(Baik)                | <p><b><u>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemkab. Barito Utara masih dalam proses penyelesaian RPJMD, sehingga belum terlihat adanya perubahan perencanaan kinerja di tingkat Pemerintah Daerah;</li> <li>2) Keterkaitan logis antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya tergambar.</li> <li>3) Masih terdapat PD yang belum menyesuaikan format dokumen manual IKU.</li> <li>4) Belum terdapat sistem dashboard monitoring kinerja terintegrasi yang dapat menampilkan perkembangan capaian secara berkala setiap kinerja dan indikator kinerja. Ketidadaan <i>dashboard</i> ini membuat proses pemantauan, deteksi dini deviasi, serta pengambilan keputusan berbasis data memungkinkan terjadi kurang optimal.</li> </ol> |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               |                                 | <p>5) Pada laporan kinerja PD belum memuat <i>benchmark</i> atau perbandingan hasil capaian kinerja dengan capaian kinerja di tingkat daerah maupun nasional, bila ada target kinerja yang dapat dibandingkan dengan target daerah maupun nasional.</p> <p>6) Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal secara kualitas masih belum memberikan detail yang cukup baik terhadap peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.</p> <p><b><u>Langkah perbaikan SAKIP:</u></b></p> <p>1) Menyelesaikan RPJMD Kab. Barito Utara periode 2025-2029.</p> <p>2) Menyusun kembali keterkaitan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan berdasarkan alur logis sehingga setiap level kinerja menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas.</p> <p>3) Memastikan seluruh dokumen manual IKU PD memiliki format yang sama dimana didalamnya memuat informasi definisi operasional, dan formulasi perhitungan.</p> <p>4) Mengembangkan <i>dashboard</i> monitoring kinerja yang menampilkan capaian indikator secara <i>real-time</i> atau berkala.</p> <p>5) Menambahkan informasi benchmarking kinerja pada laporan kinerja PD agar dapat diketahui perbandingan capaian kinerja organisasi dengan capaian daerah lainnya maupun capaian nasional.</p> <p>6) Meningkatkan kualitas dari evaluasi AKIP internal PD dengan secara optimal dan memperdalam catatan atau temuan evaluasi dengan lebih banyak mengungkapkan pada aspek kualitas dan pemanfaatan di setiap komponen dalam implementasi SAKIP PD.</p> |

| Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja Utama (IKU)    | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 107,91<br>(Baik Sekali)         | <p><b>Faktor Penyebab keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adanya tindak lanjut dari beberapa unit penyelenggara pelayanan publik atas beberapa kelemahan yang dijumpai pada hasil SKM tahun sebelumnya terutama untuk masalah antrian, perbaikan sarana dan prasarana serta penanganan pengaduan.</li> <li>2) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik.</li> <li>3) Adanya arahan dan penekanan untuk Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) terutama dalam upaya penyederhanaan prosedur pelayanan.</li> <li>4) Adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Ombudsman terhadap tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil evaluasi tersebut digunakan oleh Bupati Barito Utara untuk memberikan penekanan kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada agar melakukan pembenahan sehingga minimal bisa masuk dalam zona hijau.</li> <li>5) Adanya <i>reward</i> terhadap unit kerja yang telah menerapkan standar pelayanan publik dengan baik.</li> </ol> |
| 24. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                   | Opini BPK                        | 75%<br>(Cukup)                  | <p><b>Faktor Penyebab belum tercapai 100%:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah menyajikan nilai realisasi Tahun Anggaran 2024. Nilai realisasi yang disajikan tersebut termasuk satu paket pekerjaan yang tidak dianggarkan pada APBD Murni dan dianggarkan hanya melalui peraturan kepala daerah dari penambahan SiLPA yang mengubah postur APBD tanpa ditetapkan melalui Perda Perubahan APBD, yang</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Capaian Kinerja 2025 (kategori) | Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan langkah perbaikan/solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                               |                                 | <p>mengakibatkan realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak transparan dan akuntabel;</p> <p>2) Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyajikan nilai realisasi Belanja Modal untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024. Nilai realisasi Belanja Modal tersebut termasuk 49 paket pekerjaan yang tidak dianggarkan pada APBD Murni dan dianggarkan hanya melalui peraturan kepala daerah dari penambahan SiLPA yang mengubah postur APBD tanpa ditetapkan melalui Perda Perubahan APBD, yang mengakibatkan realisasi Belanja Modal tidak transparan dan akuntabel.</p> <p><b><u>Langkah perbaikan/Solusi:</u></b></p> <p>1) Penekanan khusus dari Bupati Barito Utara terkait peningkatan akuntabilitas keuangan menjadi salah satu masalah prioritas untuk diselesaikan.</p> <p>2) Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.</p> <p>3) Perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.</p> |



### 2.2.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dari setiap indikator kinerja utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis dengan capaian realisasi keuangan program pendukung sasaran strategis. Tingkat efisiensi positif (+) menunjukkan ada efisiensi dan sebaliknya inefisiensi jika negatif (-).

Tabel 14.  
Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran serta tingkat efisiensi

| Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                     | Kinerja |           |        | Anggaran        |                 |        | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|
|                                                                    |                                                                   | Target  | Realisasi | (%)    | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  | (%)    |                   |
| 1                                                                  | 2                                                                 | 3       | 4         | 5 =4/3 | 6               | 7               | 8 =7/6 | 5 - 8             |
| 1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah (%) | 94,5    | 100       | 105,82 | 392.392.318.302 | 272.692.609.605 | 69,49  | 36,33             |
| 2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik  | 96,83   | 92,23     | 95,25  | 330.072.000     | 197.070.820     | 59,71  | 35,55             |
| 3. Menurunnya desa/ kelurahan blankspot                            | Persentase desa/kelurahan blankspot                               | 0       | 0         | 100,00 | 67.575.463.700  | 63.958.801.143  | 94,65  | 5,35              |
| 4. Meningkatnya tingkat                                            | Rata-rata lama sekolah                                            | 8,62    | 8,93      | 103,60 | 352.415.444.860 | 333.537.681.092 | 94,64  | 8,95              |
|                                                                    | Angka melek huruf                                                 | 100     | 99,36     | 99,36  | 673.592.600     | 492.238.820     | 73,08  | 26,28             |

| Sasaran Strategis                            | Indikator Kinerja Utama (IKU)                 | Kinerja    |              |        | Anggaran        |                |        | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|--------|-----------------|----------------|--------|-------------------|
|                                              |                                               | Target     | Realisasi    | (%)    | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp) | (%)    |                   |
| 1                                            | 2                                             | 3          | 4            | 5 =4/3 | 6               | 7              | 8 =7/6 | 5 - 8             |
| pendidikan masyarakat                        |                                               |            |              |        |                 |                |        |                   |
| 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup                           | 71,33      | 73,75        | 103,39 | 131.203.615.667 | 92.059.660.473 | 70,17  | 33,23             |
| 6. Meningkatnya sektor pertanian             | PDRB sektor pertanian                         | 731.789,10 | 707.332,60   | 96,66  | 63.876.970.486  | 60.749.446.060 | 95,10  | 1,55              |
| 7. Meningkatnya sektor perikanan             | PDRB sektor perikanan                         | 202.562,40 | 203.324,10   | 100,38 | 10.488.401.796  | 10.144.463.889 | 96,72  | 3,66              |
| 8. Meningkatnya sektor perkebunan            | PDRB sektor perkebunan                        | 406.575,40 | 722.410,10   | 177,68 | 4.966.954.572   | 4.421.020.736  | 89,01  | 88,67             |
| 9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM      | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah | 172.726,80 | 188.312,60   | 109,02 | 870.745.200     | 353.161.170    | 40,56  | 68,46             |
| 10. Meningkatnya sektor perdagangan          | PDRB sektor perdagangan                       | 789.585,90 | 977.526,60   | 123,80 | 11.425.479.580  | 10.016.219.089 | 87,67  | 36,14             |
| 11. Meningkatnya sektor industri             | PDRB sektor industri                          | 1.042.183  | 1.272.924,30 | 122,14 | 1.436.026.925   | 756.446.334    | 52,68  | 69,46             |

| Sasaran Strategis                                        | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                | Kinerja |           |        | Anggaran      |                |        | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--------|---------------|----------------|--------|-------------------|
|                                                          |                                                                              | Target  | Realisasi | (%)    | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | (%)    |                   |
| 1                                                        | 2                                                                            | 3       | 4         | 5 =4/3 | 6             | 7              | 8 =7/6 | 5 - 8             |
| 12. Meningkatnya daya saing pariwisata                   | Persentase kunjungan wisata                                                  | 90      | 91,94     | 102,16 | 4.045.713.000 | 3.608.142.036  | 89,18  | 12,97             |
| 13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                 | Angka pengangguran terbuka                                                   | 3,4     | 4,54      | 66,47  | 133.648.000   | 116.025.764    | 86,81  | -20,34            |
| 14. Meningkatnya daya beli masyarakat                    | Pengeluaran perkapita pertahun                                               | 10.164  | 11.534    | 113,48 | 1.843.475.000 | 608.124.756    | 32,99  | 80,49             |
| 15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | 22,36   | 26,7      | 119,41 | 2.030.085.375 | 950.353.677    | 46,81  | 72,60             |
| 16. Meningkatnya ketertiban masyarakat                   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | 87,5    | 100       | 114,29 | 1.049.782.000 | 1.023.342.915  | 97,48  | 16,80             |

| Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja Utama (IKU)            | Kinerja |            |        | Anggaran        |                 |        | Tingkat Efisiensi |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------|--------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|
|                                                                                |                                          | Target  | Realisasi  | (%)    | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  | (%)    |                   |
| 1                                                                              | 2                                        | 3       | 4          | 5 =4/3 | 6               | 7               | 8 =7/6 | 5 - 8             |
| 17. Meningkatnya penanganan konflik                                            | Persentase kasus konflik yang tertangani | 80      | 100        | 125,00 | 57.570.082.184  | 53.901.394.441  | 93,63  | 31,37             |
| 18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup         | 73,68   | 82,06      | 111,37 | 14.842.007.520  | 11.932.745.022  | 80,40  | 30,98             |
| 19. Menurunnya stunting                                                        | Angka Prevalensi Stunting                | 16      | 4,5        | 171,88 | 126.920.460.467 | 93.343.749.012  | 73,55  | 98,33             |
| 20. Menurunnya kemiskinan                                                      | Persentase penduduk miskin               | 5,07    | 5,52       | 91,12  | 551.201.042.357 | 495.289.665.936 | 89,86  | 1,27              |
| 21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi               | B (61)  | BB (72,91) | 119,52 | 23.349.663.125  | 18.582.030.211  | 79,58  | 39,94             |
| 22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                              | B (65)  | B (64,09)  | 98,60  | 7.147.370.500   | 4.236.866.210   | 59,28  | 39,32             |

| Sasaran Strategis                                              | Indikator Kinerja Utama (IKU)    | Kinerja |           |         | Anggaran        |                 |         | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|---------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|
|                                                                |                                  | Target  | Realisasi | (%)     | Anggaran (Rp)   | Realisasi (Rp)  | (%)     |                   |
| 1                                                              | 2                                | 3       | 4         | 5 = 4/3 | 6               | 7               | 8 = 7/6 | 5 - 8             |
| 23. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | B (78)  | B (84,17) | 107,91  | 1.225.743.000   | 811.711.238     | 66,22   | 41,69             |
| 24. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                   | Opini BPK                        | WTP (1) | WDP (2)   | 75,00   | 425.932.319.250 | 283.178.358.830 | 66,48   | 8,52              |

### 2.2.3 Analisis program penunjang pencapaian target kinerja.

Program penunjang sasaran strategis dan indikator kinerja Kabupaten Barito Utara tahun 2025 pada Rencana Pembangunan Daerah dan diturunkan pada program di tingkat perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 15.

Program penunjang pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Utara

| Sasaran Strategis                                                  | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                    | Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2025                             | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | Program Penyelenggaraan Jalan                                                         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                  |
|                                                                    |                                                                  | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                        |                                                                          |
| 2. Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam) | Sekretariat Daerah (Bag. Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam) |
| 3. Menurunnya desa/kelurahan blankspot                             | Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>                       | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                   | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                             |
|                                                                    |                                                                  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                              |                                                                          |
| 4. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan              | a. Rata-rata lama sekolah<br>b. Angka melek huruf                | Program Pengelolaan Pendidikan                                                        | Dinas Pendidikan                                                         |
|                                                                    |                                                                  | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                              |                                                                          |
|                                                                    |                                                                  | Program Pengendalian Bahasa dan Sastra                                                |                                                                          |
| 5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.                      | Angka Harapan Hidup                                              | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan           | Dinas Kesehatan                                                          |

| Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja Utama (IKU)                 | Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2025               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |                                               | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan             |                                                    |
|                                                        |                                               | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman             |                                                    |
|                                                        |                                               | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                        |                                                    |
| 6. Meningkatnya sektor pertanian                       | PDRB sektor pertanian                         | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Dinas Pertanian                                    |
|                                                        |                                               | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.              |                                                    |
|                                                        |                                               | Program Penyuluhan Pertanian.                                           |                                                    |
|                                                        |                                               | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                               | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang            |
| 7. Meningkatnya sektor perikanan                       | PDRB sektor perikanan                         | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                   | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan               |
|                                                        |                                               | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                  |                                                    |
|                                                        |                                               | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                   |                                                    |
|                                                        |                                               | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan                        |                                                    |
| 8. Meningkatnya sektor perkebunan                      | PDRB sektor perkebunan                        | Program Perizinan Usaha Pertanian.                                      | Dinas Pertanian                                    |
|                                                        |                                               | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.              |                                                    |
| 9. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM serta industri | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                          | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM |
|                                                        |                                               | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) |                                                    |

| Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja Utama (IKU)  | Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2025                                                                                                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                     |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 10. Meningkatnya sektor perdagangan      | PDRB sektor perdagangan        | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                                        | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                   |
|                                          |                                | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                                                                                                       |                                                       |
|                                          |                                | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                                                                                                                           |                                                       |
| 11. Meningkatnya sektor industri         | PDRB sektor industri           | Program Perencanaan dan Pembangunan industri                                                                                                                             |                                                       |
| 12. Meningkatnya daya saing pariwisata   | Persentase kunjungan wisata    | Program Pemasaran Pariwisata                                                                                                                                             | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|                                          |                                | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                                                                                      |                                                       |
| 13. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | Angka pengangguran terbuka     | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                                                          | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM    |
| 14. Meningkatnya daya beli masyarakat    | Pengeluaran perkapita pertahun | Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                     | DPMPTSP                                               |
|                                          |                                | Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                       |
|                                          |                                | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang                                                                           |                                                       |



| Sasaran Strategis                                        | Indikator Kinerja Utama (IKU)                                                | Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2025                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                              | menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                      |                                                                 |
|                                                          |                                                                              | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                 |
| 15. Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                                                                                   | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                  |
|                                                          |                                                                              | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                   |                                                                 |
|                                                          |                                                                              | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                                                                       |                                                                 |
|                                                          |                                                                              | Program Penanganan Bencana                                                                                                                                                    |                                                                 |
| 16. Meningkatnya ketertiban masyarakat                   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                   | Satuan Polisi Pamong Praja                                      |
|                                                          |                                                                              | Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan                                                                                                                                   |                                                                 |
|                                                          |                                                                              | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                 |                                                                 |
| 17. Meningkatnya penanganan konflik                      | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     | Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                                                                    | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                               |
| 18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                          | Dinas Lingkungan Hidup<br>Dinas Pekerjaan Umum dan PenataaRuang |
|                                                          |                                                                              | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                           |                                                                 |
|                                                          |                                                                              | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                                                                      |                                                                 |
|                                                          |                                                                              | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin                                                                                                            |                                                                 |

| Sasaran Strategis         | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2025                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                                |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                               | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)                                                          |                                                                                                  |
|                           |                               | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH |                                                                                                  |
|                           |                               | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                         |                                                                                                  |
|                           |                               | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                 |                                                                                                  |
|                           |                               | Program Pengelolaan Persampahan                                                                               |                                                                                                  |
| 19. Menurunnya stunting   | Angka Prevalensi Stunting     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan                                   | Dinas Kesehatan                                                                                  |
|                           |                               | Program Pembinaan Keluarga Berencana                                                                          | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
|                           |                               | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera                                                       |                                                                                                  |
|                           |                               | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                         |                                                                                                  |
|                           |                               | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                                                               |                                                                                                  |
|                           |                               | Program Pemenuhan Hak Anak                                                                                    |                                                                                                  |
|                           |                               | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                              |                                                                                                  |
| 20. Menurunnya kemiskinan | Persentase penduduk miskin    | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                       | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                   |
|                           |                               | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan                                   |                                                                                                  |
|                           |                               | Program Pengelolaan Pendidikan                                                                                | Dinas Kesehatan                                                                                  |
|                           |                               | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                      | Dinas Pendidikan                                                                                 |

| Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2025                                  | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                |                               | Program Kawasan Permukiman                                                                 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |
|                                                |                               | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                             |                                                          |
|                                                |                               | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)                    | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM       |
|                                                |                               | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                            |                                                          |
|                                                |                               | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                      | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan                     |
|                                                |                               | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                     |                                                          |
|                                                |                               | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                       | Dinas Pertanian                                          |
|                                                |                               | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                  | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                  |
| 21. Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Penataan Organisasi) | Sekretariat Daerah                                       |
|                                                |                               | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum)   |                                                          |
|                                                |                               | Program Perekonomian dan Pembangunan. (Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa)               |                                                          |
|                                                |                               | Program Kepegawaian Daerah                                                                 | Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia    |
|                                                |                               | Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Inspektorat                                              |

| Sasaran Strategis                                                              | Indikator Kinerja Utama (IKU)    | Program dan Kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2025                                                                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 22. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                      | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                                                             | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
|                                                                                |                                  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                                                            | Sekretariat Daerah                                                |
|                                                                                |                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (subkegiatan Peningkatan Kinerja dan RB)                                                                          |                                                                   |
|                                                                                |                                  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                                                                            | Inspektorat                                                       |
| 23. Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Subkegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana)                                                         | Sekretariat Daerah                                                |
|                                                                                |                                  | Program Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
|                                                                                |                                  | Program Pencatatan Sipil                                                                                                                                                      |                                                                   |
|                                                                                |                                  | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                       |                                                                   |
|                                                                                |                                  | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                                                                                       | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu            |
|                                                                                |                                  | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                   |
| 24. Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah                          | Opini BPK                        | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                           | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset                               |
|                                                                                |                                  | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                       |                                                                   |

### 2.3. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 16.  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan dalam Pencapaian Target Kinerja

| No. | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja                                                | Program                                                                               | Anggaran        | Realisasi       | %     | Perangkat Daerah |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|
| 1.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | Program Penyelenggaraan Jalan                                                         | 378.681.750.122 | 260.456.027.248 | 68,78 | Dinas PUPR       |
|     |                                                                 |                                                                  | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                        | 13.710.568.180  | 12.236.582.357  | 89,25 | Dishub           |
| 2.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam) | 330.072.000     | 197.070.820     | 59,71 | Setda (Bag.ESDA) |
| 3.  | Menurunnya desa/ kelurahan blankspot                            | Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>                       | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                   | 26.330.719.700  | 24.976.932.610  | 94,86 | Diskominfosandi  |
|     |                                                                 |                                                                  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                              | 41.244.744.000  | 38.981.868.533  | 94,51 |                  |
| 4.  | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                      | Rata-rata lama sekolah                                           | Program Pengelolaan Pendidikan                                                        | 351.903.855.460 | 333.073.433.335 | 94,65 | Dinas Pendidikan |
|     |                                                                 |                                                                  | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                              | 511.589.400     | 464.247.757     | 90,75 |                  |
|     |                                                                 | Angka melek huruf                                                | Program Pengendalian Bahasa dan Sastra                                                | 673.592.600     | 492.238.820     | 73,08 |                  |

| No. | Sasaran Strategis                         | Indikator Kinerja     | Program                                                                     | Anggaran        | Realisasi      | %     | Perangkat Daerah                   |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|------------------------------------|
| 5.  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Hidup   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | 122.709.096.917 | 89.928.869.663 | 73,29 | Dinas Kesehatan                    |
|     |                                           |                       | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 1.729.530.000   | 1.376.362.000  | 79,58 |                                    |
|     |                                           |                       | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | 627.497.000     | 436.433.278    | 69,55 |                                    |
|     |                                           |                       | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | 6.137.491.750   | 317.995.532    | 5,18  |                                    |
| 6.  | Meningkatnya sektor pertanian             | PDRB sektor pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                        | 42.920.681.475  | 41.399.027.600 | 96,45 | Dinas Pertanian                    |
|     |                                           |                       | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.                  | 4.439.036.211   | 3.913.354.457  | 88,16 |                                    |
|     |                                           |                       | Program Penyuluhan Pertanian.                                               | 2.265.733.700   | 2.236.537.919  | 98,71 |                                    |
|     |                                           |                       | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                   | 14.251.519.100  | 13.200.526.084 | 92,63 | Dinas PUPR                         |
| 7.  | Meningkatnya sektor perikanan             | PDRB sektor perikanan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                       | 1.061.388.230   | 1.036.584.725  | 97,66 | Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan |
|     |                                           |                       | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                      | 8.283.538.200   | 8.021.860.903  | 96,84 |                                    |

| No. | Sasaran Strategis                    | Indikator Kinerja                             | Program                                                                 | Anggaran      | Realisasi     | %     | Perangkat Daerah     |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------|
|     |                                      |                                               | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                   | 428.383.400   | 424.987.050   | 99,21 |                      |
|     |                                      |                                               | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan                        | 715.091.966   | 661.031.211   | 92,44 |                      |
| 8.  | Meningkatnya sektor perkebunan       | PDRB sektor perkebunan                        | Program Perizinan Usaha Pertanian.                                      | 527.918.361   | 507.666.279   | 96,16 | Dinas Pertanian      |
|     |                                      |                                               | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.              | 4.439.036.211 | 3.913.354.457 | 88,16 |                      |
| 9.  | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                          | 573.842.000   | 69.715.672    | 12,15 | Disnakertranskop UKM |
|     |                                      |                                               | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 296.903.200   | 283.445.498   | 95,47 |                      |
| 10. | Meningkatnya sektor perdagangan      | PDRB sektor perdagangan                       | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                       | 4.180.358.480 | 3.669.180.255 | 87,77 | Disdgrin             |
|     |                                      |                                               | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting      | 5.439.610.000 | 5.061.596.523 | 93,05 |                      |
|     |                                      |                                               | Program Pengembangan Ekspor                                             | 1.464.816.750 | 1.016.564.176 | 69,40 |                      |
|     |                                      |                                               | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                          | 340.694.350   | 268.878.135   | 78,92 |                      |

| No. | Sasaran Strategis                    | Indikator Kinerja              | Program                                                                                                                                                                  | Anggaran      | Realisasi     | %             | Perangkat Daerah     |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 11. | Meningkatnya sektor industri         | PDRB sektor industri           | Program Perencanaan dan Pembangunan industri                                                                                                                             | 1.436.026.925 | 756.446.334   | 52,68         | Disdgrin             |
| 12. | Meningkatnya daya saing pariwisata   | Persentase kunjungan wisata    | Program Pemasaran Pariwisata                                                                                                                                             | 4.045.713.000 | 3.608.142.036 | 4.045.713.000 | Disbudparpora        |
| 13. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | Angka pengangguran terbuka     | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                                                          | 133.648.000   | 116.025.764   | 86,81         | Disnakertranskop UKM |
| 14. | Meningkatnya daya beli masyarakat    | Pengeluaran perkapita pertahun | Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                     | 544.735.000   | 163.936.296   | 30,09         | DPMPTSP              |
|     |                                      |                                | Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 791.560.000   | 267.938.860   | 33,85         |                      |
|     |                                      |                                | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                  | 400.000.000   | 96.005.000    | 24,00         |                      |



| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja                                                            | Program                                                                                                                                                                          | Anggaran       | Realisasi      | %     | Perangkat Daerah |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|------------------|
|     |                                                      |                                                                              | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal<br>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 107.180.000    | 80.244.600     | 74,87 |                  |
| 15. | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                                                                                      | 498.457.500    | 236.124.992    | 47,37 | Dinas Sosial PMD |
|     |                                                      |                                                                              | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                      | 808.044.600    | 455.557.960    | 56,38 |                  |
|     |                                                      |                                                                              | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                                                                          | 66.832.400     | 58.085.950     | 86,91 |                  |
|     |                                                      |                                                                              | Program Penanganan Bencana                                                                                                                                                       | 656.750.875    | 200.584.775    | 30,54 |                  |
| 16. | Meningkatnya ketertiban masyarakat                   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan                                                                                                                                      | 726.282.000    | 708.417.200    | 97,54 | Satpol PP        |
|     |                                                      |                                                                              | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                    | 323.500.000    | 314.925.715    | 97,35 |                  |
| 17. | Meningkatnya penanganan konflik                      | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                                                                       | 57.570.082.184 | 53.901.394.441 | 93,63 | Bakesbangpol     |
| 18  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                             | 773.537.570    | 428.729.306    | 55,42 | DLH              |
|     |                                                      |                                                                              | Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                             | 2.620.995.750  | 1.956.700.653  | 74,65 |                  |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Program                                                                                                                 | Anggaran       | Realisasi     | %     | Perangkat Daerah |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|------------------|
|     |                   |                   | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                               | 300.997.200    | 89.594.924    | 29,77 |                  |
|     |                   |                   | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | 10.450.000     | 5.767.875     | 55,19 |                  |
|     |                   |                   | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 303.911.000    | 210.239.307   | 69,18 |                  |
|     |                   |                   | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH           | 257.974.000    | 73.443.084    | 28,47 |                  |
|     |                   |                   | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | 182.308.000    | 141.164.094   | 77,43 |                  |
|     |                   |                   | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                   | 10.613.000     | 1.228.000     | 11,57 |                  |
|     |                   |                   | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | 78.128.000     | 65.112.970    | 83,34 |                  |
|     |                   |                   | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | 10.303.093.000 | 8.960.764.809 | 86,97 |                  |

| No. | Sasaran Strategis     | Indikator Kinerja          | Program                                                                     | Anggaran        | Realisasi       | %     | Perangkat Daerah  |
|-----|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|
| 19. | Menurunnya stunting   | Angka Prevalensi Stunting  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | 122.709.096.917 | 89.928.869.663  | 73,29 | Dinas Kesehatan   |
|     |                       |                            | Program Pembinaan Keluarga Berencana                                        | 1.836.304.800   | 1.483.342.857   | 80,78 | Disdalduk KB PPPA |
|     |                       |                            | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera                     | 1.844.855.250   | 1.533.718.495   | 83,13 |                   |
|     |                       |                            | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                       | 119.714.500     | 105.943.000     | 88,50 |                   |
|     |                       |                            | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                             | 57.945.050      | 30.722.450      | 53,02 |                   |
|     |                       |                            | Program Pemenuhan Hak Anak                                                  | 187.194.750     | 135.515.997     | 72,39 |                   |
|     |                       |                            | Program Perlindungan Khusus Anak                                            | 165.349.200     | 125.636.550     | 75,98 |                   |
| 20. | Menurunnya kemiskinan | Persentase penduduk miskin | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                     | 66.832.400      | 58.085.950      | 86,91 | Dinas Sosial PMD  |
|     |                       |                            | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | 122.709.096.917 | 89.928.869.663  | 73,29 | Dinas Kesehatan   |
|     |                       |                            | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | 351.903.855.460 | 333.073.433.335 | 94,65 | Dinas Pendidikan  |
|     |                       |                            | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                                    | 4.931.662.375   | 4.634.492.052   | 93,97 | Dinas Perkimtan   |
|     |                       |                            | Program Kawasan Permukiman                                                  | 4.068.075.000   | 3.467.598.690   | 85,24 |                   |

| No. | Sasaran Strategis                          | Indikator Kinerja          | Program                                                                                    | Anggaran       | Realisasi      | %     | Perangkat Daerah        |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|
|     |                                            |                            | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                             | 573.842.000    | 69.715.672     | 12,15 | Disnakertranskop UKM    |
|     |                                            |                            | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)                    | 296.903.200    | 283.445.498    | 95,47 |                         |
|     |                                            |                            | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                            | 133.648.000    | 116.025.764    | 86,81 | DKPP                    |
|     |                                            |                            | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                      | 1.061.388.230  | 1.036.584.725  | 97,66 |                         |
|     |                                            |                            | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                     | 8.283.538.200  | 8.021.860.903  | 96,84 |                         |
|     |                                            |                            | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                       | 42.920.681.475 | 41.399.027.600 | 96,45 | Dinas Pertanian         |
|     |                                            |                            | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                  | 14.251.519.100 | 13.200.526.084 | 92,63 | Dinas PUPR              |
| 21. | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Penataan Organisasi) | 922.816.000    | 826.081.778    | 89,52 | Setda (Bag. Organisasi) |
|     |                                            |                            | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum)   | 1.115.969.000  | 947.188.811    | 84,88 | Setda (Bag. Hukum)      |

| No. | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja                | Program                                                                                                               | Anggaran       | Realisasi      | %     | Perangkat Daerah       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|------------------------|
|     |                                                                            |                                  | Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa)                                           | 1.144.908.375  | 901.288.800    | 78,72 | Setda (Bag. PBJ)       |
|     |                                                                            |                                  | Program Kepegawaian Daerah                                                                                            | 17.701.791.750 | 13.531.962.632 | 76,44 | BKPSDM                 |
|     |                                                                            |                                  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                    | 1.720.964.000  | 1.709.704.166  | 99,35 | Inspektorat            |
|     |                                                                            |                                  | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                                               | 743.214.000    | 665.804.024    | 89,58 |                        |
| 22. | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                      | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                     | 3.357.968.500  | 1.828.085.294  | 54,44 | Bappedalitbang         |
|     |                                                                            |                                  | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                    | 1.779.476.000  | 454.062.625    | 25,52 |                        |
|     |                                                                            |                                  | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                    | 1.720.964.000  | 1.709.704.166  | 99,35 | Inspektorat            |
|     |                                                                            |                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (subkegiatan Peningkatan Kinerja dan RB)                  | 288.962.000    | 245.014.125    | 84,79 | Setda (Bag.Organisasi) |
| 23. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Subkegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana) | 292.728.000    | 280.223.814    | 95,73 | Setda (Bag.Organisasi) |

| No. | Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja | Program                                                                                                                                                                          | Anggaran        | Realisasi       | %     | Perangkat Daerah |
|-----|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|
|     |                                          |                   | Program Pendaftaran Penduduk                                                                                                                                                     | 328.251.750     | 216.122.960     | 65,84 | Disdukcapil      |
|     |                                          |                   | Program Pencatatan Sipil                                                                                                                                                         | 298.899.750     | 123.483.849     | 41,31 |                  |
|     |                                          |                   | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                                                          | 160.683.500     | 92.636.015      | 57,65 |                  |
|     |                                          |                   | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                                                                                          | 38.000.000      | 19.000.000      | 50,00 |                  |
|     |                                          |                   | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal<br>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 107.180.000     | 80.244.600      | 74,87 | DPMPTSP          |
| 24. | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | Opini BPK         | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                              | 423.118.738.875 | 281.006.584.576 | 66,41 | BPKA             |
|     |                                          |                   | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                          | 1.092.616.375   | 462.070.088     | 42,29 |                  |
|     |                                          |                   | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                                                                               | 1.720.964.000   | 1.709.704.166   | 99,35 | Inspektorat      |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 110,49% (predikat Baik Sekali) mengalami peningkatan dibandingkan kinerja tahun 2024 yaitu 106,52%. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Utara tahun 2025, yaitu 17 indikator atau 68% bermakna Baik Sekali, 6 indikator atau 24% bermakna Baik dan 2 atau 8% bermakna Cukup.

Dari 25 Indikator Kinerja Utama (IKU), 18 indikator mampu memenuhi/melampaui target 100% dan 7 indikator belum memenuhi target (di bawah 100%). Adapun IKU yang mampu memenuhi target dengan capaian kinerja 100% atau lebih antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah
2. Persentase desa/kelurahan blankspot
3. Rata-rata lama sekolah
4. Angka Harapan Hidup
5. PDRB sektor perikanan
6. PDRB sektor perkebunan
7. PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah
8. PDRB sektor perdagangan
9. PDRB sektor industri
10. Persentase kunjungan wisata
11. Pengeluaran perkapita pertahun
12. Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri
13. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)
14. Persentase kasus konflik yang tertangani
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
16. Angka Prevalensi Stunting
17. Indeks Reformasi Birokrasi

## 18. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mampu mencapai target 100% antara lain:

1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik
2. Angka Melek Huruf
3. PDRB sektor pertanian
4. Angka Pengangguran Terbuka
5. Persentase penduduk miskin
6. Nilai SAKIP
7. Opini BPK

## 4.1 Rencana Tindak Lanjut

### 4.1.1 Tindak Lanjut untuk IKU yang Belum Memenuhi Target

Rencana tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk meningkatkan kinerja pencapaian indikator yang masih belum memenuhi target 100% tahun 2022 antara lain:

#### 1. Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik

- a. Meningkatkan dukungan dan koordinasi dengan PLN dalam rangka penanganan permasalahan pembangunan jaringan listrik berkaitan masalah pembebasan jalan (*row*) dengan memediasi pertemuan antara warga beserta dengan perwakilan dari PLN. Telah dibentuk tim terpadu yang melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan permasalahan pembebasan lahan.
- b. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terutama dalam pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

#### 2. Angka Melek Huruf

- a. Melaksanakan sosialisasi dan pendekatan intensif kepada kelompok masyarakat tentang pentingnya pendidikan.



- b. Melaksanakan kampanye dan pembudayaan gemar membaca sampai ke tingkat desa.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada lembaga non formal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya.

### **3. PDRB sektor pertanian**

- a. Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil pertanian.
- b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.
- c. Penguatan kelembagaan Petani melalui bimbingan dan sosialisasi mengenai penggunaan varietas unggul, pemberian pupuk sesuai rekomendasi, optimalisasi lahan, dan pengendalian hama penyakit.
- d. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan.

### **4. Angka pengangguran terbuka**

- a. Meningkatkan Pelayanan informasi ketenagakerjaan melalui penyebaran informasi tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Peningkatan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- d. peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi untuk meningkatkan serapan tenaga kerja di Barito Utara melalui promosi, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi.
- e. Peningkatan program untuk menciptakan wirausahawan baru.

### **5. Persentase penduduk miskin**

- a. Mengoordinasikan dan mensinkronkan program-program penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah serta mengupayakan pengurangan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Barito Utara
- b. Memperkuat sinergi dengan pihak swasta guna peningkatan kualitas SDM dan mendorong pembangunan di desa-desa terpencil
- c. Meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian infrastruktur jalan dalam rangka mempermudah akses pendirian jaringan PLN desa.

## 6. Nilai SAKIP

- a. Menyelesaikan RPJMD Kab. Barito Utara periode 2025-2029.
- b. Menyusun kembali keterkaitan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan berdasarkan alur logis sehingga setiap level kinerja menunjukkan hubungan sebab–akibat yang jelas.
- c. Memastikan seluruh dokumen manual IKU PD memiliki format yang sama dimana didalamnya memuat informasi definisi operasional, dan formulasi perhitungan.
- d. Mengembangkan dashboard monitoring kinerja yang menampilkan capaian indikator secara real-time atau berkala.
- e. Menambahkan informasi *benchmarking* kinerja pada laporan kinerja PD agar dapat diketahui perbandingan capaian kinerja organisasi dengan capaian daerah lainnya maupun capaian nasional.
- f. Meningkatkan kualitas dari evaluasi AKIP internal PD dengan secara optimal dan memperdalam catatan atau temuan evaluasi dengan lebih banyak mengungkapkan pada aspek kualitas dan pemanfaatan di setiap komponen dalam implementasi SAKIP PD.

## 7. Opini BPK

- a. Penekanan khusus dari Bupati Barito Utara terkait peningkatan akuntabilitas keuangan menjadi salah satu masalah prioritas untuk diselesaikan.
- b. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK.
- c. Perbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.



# LAMPIRAN



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 188.45/ 60 /2025

TENTANG

PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/98/2024;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi Indikator Kinerja Utama yang lebih berorientasi hasil (*outcome*) dan memenuhi prinsip *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound* (SMART) maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
3. Masing-masing Unit Kerja Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 188.45/ 60 /2025  
TENTANG  
PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN  
2024-2026

PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

| Rumusan pada RPD 2024-2026 (sebelum penyesuaian) |                                                                                                         |                                                                  | Penyesuaian                                                         | Sesudah penyesuaian                                             |                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| No.                                              | Sasaran                                                                                                 | Indikator                                                        |                                                                     | Sasaran                                                         | Indikator                                                        |
| 1                                                | Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan                                    | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    |
| 2                                                | Meningkatnya Infrastruktur perdesaan dan pengembangan jaringan listrik kelistrikan serta energi lainnya | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik |
| 3                                                | Berkembangnya jaringan telekomunikasi dan informasi                                                     | Persentase desa/kelurahan blankspot                              | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Menurunnya desa/kelurahan <i>blankspot</i>                      | Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>                       |
| 4                                                | Meningkatnya minat wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun                                        | Rata-rata lama sekolah                                           | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                      | Rata-rata lama sekolah                                           |
|                                                  |                                                                                                         | Angka melek huruf                                                |                                                                     |                                                                 | Angka melek huruf                                                |
| 5                                                | Meningkatnya fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik                                                   | Rasio tenaga pendidik terhadap murid                             | Dikeluarkan dari IKU Kabupaten dan dijadikan IKU pada tingkat Dinas |                                                                 |                                                                  |
| 6                                                | Meningkatnya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan                                       | Angka Harapan Hidup                                              | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                             | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                       | Angka Harapan Hidup                                              |



| Rumusan pada RPD 2024-2026 (sebelum penyesuaian) |                                                                                                                |                                               | Penyesuaian                                                   | Sesudah penyesuaian                  |                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| No.                                              | Sasaran                                                                                                        | Indikator                                     |                                                               | Sasaran                              | Indikator                                     |
|                                                  | pelayanan bidang kesehatan                                                                                     |                                               |                                                               |                                      |                                               |
| 7.                                               | Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil pertanian        | PDRB sektor pertanian                         | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya sektor pertanian        | PDRB sektor pertanian                         |
| 8.                                               | Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perikanan        | PDRB sektor perikanan                         | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya sektor perikanan        | PDRB sektor perikanan                         |
| 9.                                               | Meningkatnya produksi, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pemasaran hasil perkebunan       | PDRB sektor perkebunan                        | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya sektor perkebunan       | PDRB sektor perkebunan                        |
| 10.                                              | Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industri         | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah | Rumusan sasaran diubah dan dipecah menjadi 3, indikator tetap | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah |
|                                                  |                                                                                                                | PDRB sektor perdagangan                       |                                                               | Meningkatnya sektor perdagangan      | PDRB sektor perdagangan                       |
|                                                  |                                                                                                                | PDRB sektor industri                          |                                                               | Meningkatnya sektor industri         | PDRB sektor industri                          |
| 11.                                              | Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi | Angka pengangguran terbuka                    | Dihilangkan dan disinergikan dengan sasaran 13                |                                      |                                               |
|                                                  |                                                                                                                | Pendapatan Perkapita Penduduk                 |                                                               |                                      |                                               |
| 12.                                              | Berkembangnya pemasaran pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan                                         | Kunjungan wisata                              | Rumusan sasaran diubah, indikator disempurnakan               | Meningkatnya daya saing pariwisata   | Persentase kunjungan wisata                   |



| Rumusan pada RPD 2024-2026 (sebelum penyesuaian) |                                                                                                                                                |                                                                              | Penyesuaian                                                   | Sesudah penyesuaian                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                              | Sasaran                                                                                                                                        | Indikator                                                                    |                                                               | Sasaran                                              | Indikator                                                                    |
| 13.                                              | Meningkatnya kesempatan kerja dan penciptaan iklim usaha yang kondusif                                                                         | Angka pengangguran terbuka                                                   | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                 | Angka pengangguran terbuka                                                   |
|                                                  |                                                                                                                                                | Pengeluaran perkapita pertahun                                               | Rumusan sasaran ditambahkan, indikator tetap                  | Meningkatnya daya beli masyarakat                    | Pengeluaran perkapita pertahun                                               |
| 14.                                              | Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | Rumusan sasaran diubah, indikator tetap                       | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            |
| 15.                                              | Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan konflik dan pengembangan wawasan kebangsaan dan politik                       | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | Rumusan sasaran diubah dan dipecah menjadi 2, indikator tetap | Meningkatnya ketertiban masyarakat                   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) |
|                                                  |                                                                                                                                                | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     |                                                               | Meningkatnya penanganan konflik                      | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     |
| 16.                                              | Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup                             | Indeks Kualitas Air<br>Indeks Kualitas Udara<br>Indeks Kualitas Tanah        | Rumusan sasaran diubah; indikator disederhanakan              | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup               | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                             |
| 17.                                              | Menurunnya Angka Stunting                                                                                                                      | Persentase menurunnya angka stunting                                         | Rumusan sasaran dan indikator disempurnakan                   | Menurunnya stunting                                  | Angka Prevalensi Stunting                                                    |



| Rumusan pada RPD 2024-2026 (sebelum penyesuaian) |                                                                          |                                                               | Penyesuaian                                              | Sesudah penyesuaian                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| No.                                              | Sasaran                                                                  | Indikator                                                     |                                                          | Sasaran                                                                    | Indikator                        |
| 18.                                              | Menurunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim                       | Persentase menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim       | Rumusan sasaran dan indikator diubah                     | Menurunnya kemiskinan                                                      | Persentase penduduk miskin       |
| 19.                                              | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan  | Indeks Reformasi Birokrasi                                    | Rumusan sasaran diubah; indikator tetap                  | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi       |
| 20.                                              | Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah                     | Nilai SAKIP                                                   | Rumusan sasaran diubah; indikator tetap                  | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                      |
| 21.                                              | Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Publik                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                              | Rumusan sasaran diubah; indikator tetap                  | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| 22.                                              | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik             | Opini BPK                                                     | Rumusan sasaran diubah; indikator tetap                  | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                                   | Opini BPK                        |
| 23.                                              | Pengembangan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah           | PDRB sektor pertanian                                         | Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 7, 8 dan 9 | -                                                                          | -                                |
|                                                  |                                                                          | PDRB sektor perikanan                                         |                                                          |                                                                            |                                  |
|                                                  |                                                                          | PDRB sektor perkebunan                                        |                                                          |                                                                            |                                  |
| 24.                                              | Pengembangan akses infrastruktur menuju Ibu Kota Nusantara (IKN)         | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 1          | -                                                                          | -                                |
| 25.                                              | Pengembangan Industri dan Perdagangan mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah                 | Tidak dimasukkan, disinergikan dengan sasaran 10         | -                                                                          | -                                |
|                                                  |                                                                          | PDRB sektor perdagangan                                       |                                                          |                                                                            |                                  |
|                                                  |                                                                          | PDRB sektor industri                                          |                                                          |                                                                            |                                  |

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 188.45/ 60 /2025  
TENTANG  
PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN  
2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026 HASIL PENYESUAIAN

| No | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja Utama                                          | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                  | Penjelasan/formula perhitungan                                                                                        | Sumber Data              | Penanggung Jawab Data                          |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | Indikator menggambarkan keterhubungan antara desa/kelurahan ke ibu kota kecamatan melalui akses jalan darat. Persentase merupakan perbandingan jumlah desa/kelurahan yang terhubung terhadap jumlah total desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Barito Utara                            | $\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$ | Data Bina Marga          | Dinas PUPR                                     |
| 2. | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | Indikator menggambarkan keterhubungan desa/kelurahan di seluruh wilayah Kab. Barito Utara dengan jaringan listrik PLN. Persentase merupakan perbandingan jumlah desa/kelurahan yang terhubung jaringan listrik terhadap jumlah total desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Barito Utara | $\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan yang terhubung jaringan listrik}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$     | Data jaringan PLN        | Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda |
| 3. | Menurunnya desa/ kelurahan blankspot                            | Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>                       | Indikator menggambarkan kekosongan jaringan telekomunikasi GSM pada desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Barito Utara                                                                                                                                                                  | $\frac{\text{jumlah desa/ kelurahan blankspot}}{\text{Jumlah desa/kelurahan}} \times 100\%$                           | Data jaringan komunikasi | Diskominfo-sandi                               |



| No | Sasaran Strategis                          | Indikator Kinerja Utama | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Penjelasan/formula perhitungan                                                                                                                                                                                                                                                             | Sumber Data   | Penanggung Jawab Data |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|    |                                            |                         | Desa/kelurahan <i>blankspot</i> meruakan desa/kelurahan yang masih belum tersedia jaringan signal GSM.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                       |
| 4. | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat | Rata-rata lama sekolah  | Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat.<br>Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani.                                                         | $\left( \frac{\text{Jumlah tahun belajar penduduk usia } \geq 15\text{th yg diselesaikan}}{\text{Jumlah penduduk usia } \geq 15\text{th}} \right) \times 100\%$                                                                                                                            | Publikasi BPS | Dinas Pendidikan      |
|    |                                            | Angka melek huruf       | Salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan suatu wilayah.<br>Angka melek huruf adalah perbandingan jumlah penduduk berumur $\geq 15$ tahun yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dengan huruf latin dan atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk umur $\geq 15$ tahun. | $\frac{\text{Jumlah penduduk } \geq 15\text{thn yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk } \geq 15\text{thn}} \times 100\%$                                                                                                                                                                | Publikasi BPS | Dinas Pendidikan      |
| 5. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  | Angka Harapan Hidup     | Indikator menggambarkan derajat kesehatan masyarakat.<br>Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata tahun hidup yang dapat dicapai seseorang sejak lahir                                                                                                                                           | AHH dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack dengan data yang bersumber dari Sensus Penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai proxy/pendekatan. | Publikasi BPS | Dinas Kesehatan       |
| 6. | Meningkatnya sektor pertanian              | PDRB sektor pertanian   | PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam periode tertentu.                                                                                                                                                                                   | Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pertanian sesuai pedoman BPS                                                                                                                                                                                    | Publikasi BPS | Dinas Pertanian       |

| No  | Sasaran Strategis                    | Indikator Kinerja Utama                       | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                            | Penjelasan/formula perhitungan                                                                                                     | Sumber Data           | Penanggung Jawab Data                           |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 7.  | Meningkatnya sektor perikanan        | PDRB sektor perikanan                         | PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan dalam periode tertentu.                                                                                                         | Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perikanan sesuai pedoman BPS                            | Publikasi BPS         | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan            |
| 8.  | Meningkatnya sektor perkebunan       | PDRB sektor perkebunan                        | PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perkebunan dalam periode tertentu.                                                                                                        | Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perkebunan sesuai pedoman BPS                           | Publikasi BPS         | Dinas Pertanian                                 |
| 9.  | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah | PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor koperasi dan usaha kecil menengah dalam periode tertentu.                                                                                 | Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai pedoman BPS    | Publikasi BPS         | Disnakertrans Kop-UKM                           |
| 10. | Meningkatnya sektor perdagangan      | PDRB sektor perdagangan                       | PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perdagangan dalam periode tertentu.                                                                                                       | Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Perdagangan sesuai pedoman BPS                          | Publikasi BPS         | Dinas Perdagangan dan Perindustrian             |
| 11. | Meningkatnya sektor industri         | PDRB sektor industri                          | PDRB sektor pertanian adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor industri dalam periode tertentu.                                                                                                          | Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Industri sesuai pedoman BPS                             | Publikasi BPS         | Dinas Perdagangan dan Perindustrian             |
| 12. | Meningkatnya daya saing pariwisata   | Persentase kunjungan wisata                   | Indikator uang menunjukkan banyaknya orang yang berkunjung ke wisata di wilayah Kabupaten Barito Utara. Persentase kunjungan wisata adalah perbandingan antara jumlah realisasi kunjungan wisata dengan jumlah yang ditargetkan | $\left( \frac{\text{Jumlah realisasi kunjungan wisata}}{\text{Jumlah kunjungan wisata yang ditargetkan}} \right) \times 100\%$     | Data kunjungan wisata | Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga |
| 13. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja | Angka pengangguran terbuka                    | Indikator yang menggambarkan seberapa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Angka Pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja                                 | $\left( \frac{\text{Jumlah Pengangguran terbuka usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \right) \times 100\%$ | Publikasi BPS         | Disnakertrans Kop-UKM                           |



| No  | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja Utama                                                      | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penjelasan/formula perhitungan                                                                                                   | Sumber Data                                    | Penanggung Jawab Data             |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14. | Meningkatnya daya beli masyarakat                    | Pengeluaran perkapita pertahun                                               | Pengeluaran per kapita per tahun adalah biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga untuk konsumsi selama setahun dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga                                                                                                                                                                                                                         | Biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga untuk konsumsi selama setahun dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga | Publikasi BPS                                  | Disnakertrans Kop-UKM             |
| 15. | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri adalah jumlah PMKS yang mandiri dibagi dengan jumlah total PMKS yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara.<br>PMKS Mandiri merupakan penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial yang meningkat kesejahteraannya, mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga sudah memenuhi kriteria mandiri dan tidak memperoleh bantuan lagi. | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah Total PMKS}} \times 100\%$                                                  | Data Kesejahteraan sosial                      | Dinas Sosial-PMD                  |
| 16. | Meningkatnya ketertiban masyarakat                   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | Indikator yang menggambarkan tingkat penyelesaian terhadap kasus pelanggaran yang dilakukan warga menyangkut ketertiban, ketenteraman dan keindahan                                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang terjadi}} \times 100\%$                  | Data pelanggaran K3                            | Satuan Polisi Pamong Praja        |
| 17. | Meningkatnya penanganan konflik                      | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     | Indikator yang menggambarkan penanganan terhadap kasus konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara. Konflik sosial yang terjadi antara lain: konflik sosial antara masyarakat dan perusahaan, konflik tata batas, sosial budaya, dan konflik hukum.                                                                                                                            | $\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus konflik sosial}} \times 100\%$                           | Data Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik |

| No  | Sasaran Strategis                          | Indikator Kinerja Utama          | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penjelasan/formula perhitungan                                                                                                                                                      | Sumber Data                                       | Penanggung Jawab Data  |
|-----|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 18. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH untuk wilayah Kabupaten/Kota merupakan angka komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)                                                                                       | $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$                                                                                                               | Data kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan | Dinas Lingkungan Hidup |
| 19. | Menurunnya stunting                        | Angka Prevalensi Stunting        | Prevalensi stunting adalah persentase jumlah balita yang mengalami gangguan pertumbuhan fisik dalam suatu populasi. Prevalensi stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita                                                                                                                                                                                              | Prevalensi stunting diperoleh dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)<br><br>$Prevalensi = (\text{jumlah stunting pada balita} \div \text{total jumlah balita}) \times 100$        | Data hasil SSGI                                   | Dinas KB-P3A           |
| 20. | Menurunnya kemiskinan                      | Persentase penduduk miskin       | Persentase penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. | Jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah penduduk seluruhnya pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%). | Publikasi BPS                                     | Bapperida              |
| 21. | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi | Indeks Reformasi Birokrasi       | Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Penentuan Indeks Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan MenPANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.                                                       | Hasil Evaluasi RB dari                            | Tim RB                 |



| No  | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja Utama          | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Penjelasan/formula perhitungan                                                                                                                                                                                                              | Sumber Data                                         | Penanggung Jawab Data   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
|     |                                                                            |                                  | daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan ( <i>immediate outcomes</i> ) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran strategis yang merupakan outcomes dari implementasi kebijakan ( <i>intermediate outcomes</i> ).                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | Kementerian PANRB                                   |                         |
| 22. | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                      | Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN/APBD pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada pemerintah daerah. | Penilaian dan penentuan predikat mengacu pada Peraturan MenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.                                                                                            | Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB | Tim SAKIP               |
| 23. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan.                                                                                                                                                                                | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mengacu kepada Peraturan MenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. | Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat            | Bagian Organisasi Setda |

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 Hasil Penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 Hasil Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.



| No  | Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja Utama | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penjelasan/formula perhitungan                                                                                               | Sumber Data | Penanggung Jawab Data |
|-----|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 24. | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | Opini BPK               | <p>Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;</li> <li>2. kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>);</li> <li>3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;</li> <li>4. efektivitas sistem pengendalian intern.</li> </ol> | Pemberian opini sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. | Laporan BPK | BPKA                  |

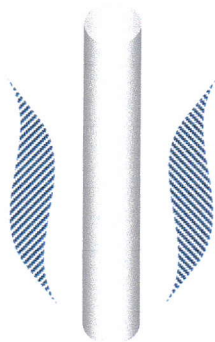
Pj. BUPATI BARITO UTARA,



MUHLIS



# **PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025**



**MUARA TEWEH  
2025**



## BUPATI BARITO UTARA

### PERJANJIAN KINERJA 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHLIS**  
Jabatan : **Pj. BUPATI BARITO UTARA**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muara Teweh, 12 Februari 2025.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KABUPATEN BARITO UTARA**

| No. | Sasaran Strategis                                               | Indikator                                                                    | Satuan      | Target    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah                | %           | 94,5      |
| 2.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik             | %           | 96,83     |
| 3.  | Menurunnya desa/kelurahan blankspot                             | Persentase desa/kelurahan blankspot                                          | %           | 0         |
| 4.  | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                      | Rata-rata lama sekolah                                                       | Tahun       | 8,62      |
|     |                                                                 | Angka melek huruf                                                            | %           | 100       |
| 5.  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                       | Angka Harapan Hidup                                                          | Tahun       | 71,33     |
| 6.  | Meningkatnya sektor pertanian                                   | PDRB sektor pertanian                                                        | Juta rupiah | 731.789,1 |
| 7.  | Meningkatnya sektor perikanan                                   | PDRB sektor perikanan                                                        | Juta rupiah | 202.562,4 |
| 8.  | Meningkatnya sektor perkebunan                                  | PDRB sektor perkebunan                                                       | Juta rupiah | 406.575,4 |
| 9.  | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM                            | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah                                | Juta rupiah | 172.726,8 |
| 10. | Meningkatnya sektor perdagangan                                 | PDRB sektor perdagangan                                                      | Juta rupiah | 789.585,9 |
| 11. | Meningkatnya sektor industri                                    | PDRB sektor industri                                                         | Juta rupiah | 1.042.183 |
| 12. | Meningkatnya daya saing pariwisata                              | Persentase kunjungan wisata                                                  | %           | 90        |
| 13. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                            | Angka pengangguran terbuka                                                   | %           | 3,40      |
| 14. | Meningkatnya daya beli masyarakat                               | Pengeluaran perkapita pertahun                                               | Juta rupiah | 10.164    |
| 15. | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial            | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | %           | 22,36     |
| 16. | Meningkatnya ketertiban masyarakat                              | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | %           | 87,5      |
| 17. | Meningkatnya penanganan konflik                                 | Persentase kasus konflik yang tertangani                                     | %           | 80        |



| No. | Sasaran Strategis                                                          | Indikator                        | Satuan               | Target  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|
| 18. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai                | 73,68   |
| 19. | Menurunnya stunting                                                        | Angka Prevalensi Stunting        | %                    | 16      |
| 20. | Menurunnya kemiskinan                                                      | Persentase penduduk miskin       | %                    | 5,07    |
| 21. | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi       | Kategori (nilai)     | B (61)  |
| 22. | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                      | Kategori (nilai)     | B (67)  |
| 23. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Predikat (nilai)     | B (78)  |
| 24. | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah                                   | Opini BPK                        | Predikat (opini ke-) | WTP (1) |

| No. | Program                                                                     | Anggaran            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Program Penyelenggaraan Jalan                                               | Rp. 300.630.344.285 |
| 2.  | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                              | Rp. 16.935.429.550  |
| 3.  | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                         | Rp. 16.043.019.100  |
| 4.  | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                    | Rp. 24.619.527.000  |
| 5.  | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | Rp. 259.447.879.038 |
| 6.  | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                    | Rp. 500.000.000     |
| 7.  | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra                                      | Rp. 115.000.000     |
| 8.  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | Rp. 77.602.668.903  |
| 9.  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Rp. 419.211.000     |
| 10. | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                 | Rp. 766.797.000     |
| 11. | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Rp. 409.666.750     |
| 12. | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                       | Rp. 671.991.530     |
| 13. | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                      | Rp. 3.463.174.240   |
| 14. | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                       | Rp. 312.817.975     |
| 15. | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan                            | Rp. 417.514.100     |
| 16. | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                        | Rp. 27.950.166.355  |
| 17. | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.                  | Rp. 2.091.729.723   |

|     |                                                                                                                                                                                        |     |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 18. | Program Perizinan Usaha Pertanian.                                                                                                                                                     | Rp. | 545.151.486   |
| 19. | Program Penyuluhan Pertanian.                                                                                                                                                          | Rp. | 1.179.996.950 |
| 20. | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                                                                                              |     | 8.164.778.100 |
| 21. | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                                                                                               | Rp. | 3.921.374.375 |
| 22. | Program Kawasan Permukiman                                                                                                                                                             | Rp. | 2.722.660.000 |
| 23. | Program Peningkatan Sarana Distribusi<br>Perdagangan                                                                                                                                   | Rp. | 3.378.763.480 |
| 24. | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok<br>dan Barang Penting                                                                                                                  | Rp. | 2.047.430.000 |
| 25. | Program Pengembangan Ekspor                                                                                                                                                            | Rp. | 1.292.100.750 |
| 26. | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                                                                                                                                         | Rp. | 325.194.350   |
| 27. | Program Perencanaan dan Pembangunan industri                                                                                                                                           | Rp. | 686.976.550   |
| 28. | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                                                                        | Rp. | 151.317.000   |
| 29. | Program Pemberdayaan dan Perlindungan<br>Koperasi                                                                                                                                      | Rp. | 442.556.000   |
| 30. | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha<br>Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)                                                                                                             | Rp. | 70.379.000    |
| 31. | Program Promosi Penanaman Modal<br>Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang<br>menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Rp. | 936.160.000   |
| 32. | Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan<br>Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu<br>Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi<br>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | Rp. | 1.012.640.000 |
| 33. | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman<br>Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman<br>Modal yang menjadi Kewenangan Daerah<br>Kabupaten/Kota                                       | Rp. | 300.000.000   |
| 34. | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi<br>Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi<br>Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi<br>pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 193.480.000   |
| 35. | Program Pembinaan Keluarga Berencana                                                                                                                                                   | Rp. | 1.697.860.000 |
| 36. | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga<br>Sejahtera                                                                                                                             | Rp. | 1.656.303.750 |
| 37. | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                                                                                                                                  | Rp. | 144.145.900   |
| 38. | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan<br>Anak                                                                                                                                     | Rp. | 50.000.000    |
| 39. | Program Pemenuhan Hak Anak                                                                                                                                                             | Rp. | 140.000.000   |
| 40. | Program Perlindungan Khusus Anak                                                                                                                                                       | Rp. | 145.000.000   |
| 41. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                                                                                   | Rp. | 791.120.710   |
| 42. | Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau<br>Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                | Rp. | 3.930.572.500 |
| 43. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                                                                                              | Rp. | 190.847.100   |
| 44. | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan<br>Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan<br>Beracun (Limbah B3)                                                                         | Rp. | 15.730.000    |
| 45. | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap<br>Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan<br>Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)                                                          | Rp. | 368.906.000   |



|     |                                                                                                               |     |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 46. | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH | Rp. | 284.672.000    |
| 47. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                    | Rp. | 279.952.000    |
| 48. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                         | Rp. | 20.000.000     |
| 49. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                 | Rp. | 222.947.000    |
| 50. | Program Pengelolaan Persampahan                                                                               | Rp. | 10.964.270.000 |
| 51. | Program Pendaftaran Penduduk                                                                                  | Rp. | 433.466.250    |
| 52. | Program Pencatatan Sipil                                                                                      | Rp. | 394.562.250    |
| 53. | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                       | Rp. | 231.648.750    |
| 54. | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                       | Rp. | 38.000.000     |
| 55. | Program Pemasaran Pariwisata                                                                                  | Rp. | 34.990.000     |
| 56. | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                           | Rp. | 2.964.621.000  |
| 57. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                                                          |     | 433.298.000    |
| 58. | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                                        | Rp. | 8.863.165.000  |
| 59. | Program Pengembangan Kebudayaan                                                                               | Rp. | 2.665.330.400  |
| 60. | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                                                     | Rp. | 82.939.200     |
| 61. | Program Pengelolaan Permuseuman                                                                               | Rp. | 20.150.000     |
| 62. | Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat                                                                   | Rp. | 603.070.000    |
| 63. | Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan                                                                   | Rp. | 389.399.000    |
| 64. | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                                                 | Rp. | 393.000.000    |
| 65. | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                       | Rp. | 787.230.000    |
| 66. | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                  | Rp. | 2.673.017.850  |
| 67. | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                   | Rp. | 3.055.590.000  |
| 68. | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                   | Rp. | 3.639.548.600  |
| 69. | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                       | Rp. | 1.191.192.400  |
| 70. | Program Penanganan Bencana                                                                                    | Rp. | 1.693.856.375  |
| 71. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.                                                  | Rp. | 1.497.000.000  |
| 72. | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.                                                                | Rp. | 2.311.882.750  |
| 73. | Program Perekonomian dan Pembangunan.                                                                         | Rp. | 1.705.400.625  |
| 74. | Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam)                         | Rp. | 400.000.000    |
| 75. | Program Kepegawaian Daerah                                                                                    | Rp. | 20.512.339.750 |
| 76. | Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                    | Rp. | 2.390.640.000  |
| 77. | Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                                               | Rp. | 851.564.000    |
| 78. | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                             | Rp. | 2.401.082.750  |



|     |                                                                    |     |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| 79. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. | 1.779.476.000 |
| 80. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                | Rp. | 5.135.219.125 |
| 81. | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | Rp. | 1.092.620.675 |

Muara Teweh, ~~12~~ Februari 2025.

Pj. BUPATI BARITO UTARA,



## RENCANA AKSI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025

| No. | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja                                                | Satuan      | Target     |             |              |             | Program                                                                               | Anggaran        | Penanggung Jawab   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|     |                                                                 |                                                                  |             | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |                                                                                       |                 |                    |
| 1.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan pusat wilayah    | %           | -          | -           | -            | 94,5        | Program Penyelenggaraan Jalan                                                         | 300.630.344.285 | Dinas PUPR         |
|     |                                                                 |                                                                  |             |            |             |              |             | Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan                                        | 16.935.429.550  | Dinas Perhubungan  |
| 2.  | Meningkatnya desa/kelurahan yang terhubung listrik              | Persentase desa/kelurahan yang terhubung dengan jaringan listrik | %           | -          | -           | -            | 96,83       | Program Perekonomian dan Pembangunan (Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam) | 400.000.000     | Sekretariat Daerah |
| 3.  | Menurunnya desa/ kelurahan blankspot                            | Persentase desa/kelurahan <i>blankspot</i>                       | %           | -          | -           | -            | 0           | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                                   | 16.043.019.100  | DiskominfoSandi    |
|     |                                                                 |                                                                  |             |            |             |              |             | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                              | 24.619.527.000  | DiskominfoSandi    |
| 4.  | Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat                      | Rata-rata lama sekolah                                           | Tahun       | -          | -           | -            | 8,62        | Program Pengelolaan Pendidikan                                                        | 259.447.879.038 | Dinas Pendidikan   |
|     |                                                                 |                                                                  |             |            |             |              |             | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                              | 500.000.000     | Dinas Pendidikan   |
|     |                                                                 | Angka melek huruf                                                | %           | -          | -           | -            | 100         | Program Pengendalian Bahasa dan Sastra                                                | 115.000.000     | Dinas Pendidikan   |
| 5.  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                       | Angka Harapan Hidup                                              | Tahun       | -          | -           | -            | 71,33       | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan           | 77.602.668.903  | Dinas Kesehatan    |
|     |                                                                 |                                                                  |             |            |             |              |             | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                           | 419.211.000     | Dinas Kesehatan    |
|     |                                                                 |                                                                  |             |            |             |              |             | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman                           | 766.797.000     | Dinas Kesehatan    |
|     |                                                                 |                                                                  |             |            |             |              |             | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                      | 409.666.750     | Dinas Kesehatan    |
| 6.  | Meningkatnya sektor pertanian                                   | PDRB sektor pertanian                                            | Juta rupiah | -          | -           | -            | 731.789,10  | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                                  | 27.950.166.355  | Dinas Pertanian    |
|     |                                                                 |                                                                  |             |            |             |              |             | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.                            | 2.091.729.723   | Dinas Pertanian    |
|     |                                                                 |                                                                  |             |            |             |              |             | Program Penyuluhan Pertanian.                                                         | 1.179.996.950   | Dinas Pertanian    |
|     |                                                                 |                                                                  |             |            |             |              |             | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                             | 8.164.778.100   | Dinas PUPR         |

| No. | Sasaran Strategis                    | Indikator Kinerja                             | Satuan      | Target     |             |              |              | Program                                                                 | Anggaran      | Penanggung Jawab                     |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|     |                                      |                                               |             | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV  |                                                                         |               |                                      |
| 7.  | Meningkatnya sektor perikanan        | PDRB sektor perikanan                         | Juta rupiah | -          | -           | -            | 202.562,40   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                   | 671.991.530   | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                  | 3.463.174.240 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan                   | 312.817.975   | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan                        | 417.514.100   | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 8.  | Meningkatnya sektor perkebunan       | PDRB sektor perkebunan                        | Juta rupiah | -          | -           | -            | 406.575,40   | Program Perizinan Usaha Pertanian.                                      | 545.151.486   | Dinas Pertanian                      |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.              | 2.091.729.723 | Dinas Pertanian                      |
| 9.  | Meningkatnya sektor koperasi dan UKM | PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah | Juta rupiah | -          | -           | -            | 172.726,80   | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                          | 442.556.000   | Disnakertrankop-UKM                  |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 70.379.000    | Disnakertrankop-UKM                  |
| 10. | Meningkatnya sektor perdagangan      | PDRB sektor perdagangan                       | Juta rupiah | -          | -           | -            | 789.585,90   | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                       | 3.378.763.480 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian  |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting      | 2.047.430.000 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian  |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Pengembangan Ekspor                                             | 1.292.100.750 |                                      |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                          | 325.194.350   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian  |
| 11. | Meningkatnya sektor industri         | PDRB sektor industri                          | Juta rupiah | -          | -           | -            | 1.042.183,00 | Program Perencanaan dan Pembangunan industri                            | 686.976.550   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian  |
| 12. | Meningkatnya daya saing pariwisata   | Persentase kunjungan wisata                   | %           | -          | -           | -            | 90,00        | Program Pemasaran Pariwisata                                            | 34.990.000    | Disbudparpora                        |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                     | 2.964.621.000 | Disbudparpora                        |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Pengembangan Kebudayaan                                         | 2.665.330.400 | Disbudparpora                        |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                               | 82.939.200    | Disbudparpora                        |
|     |                                      |                                               |             |            |             |              |              | Program Pengelolaan Permuseuman                                         | 20.150.000    | Disbudparpora                        |



| No. | Sasaran Strategis                                    | Indikator Kinerja                                                            | Satuan      | Target     |             |              |             | Program                                                                                                                                                                       | Anggaran      | Penanggung Jawab    |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|     |                                                      |                                                                              |             | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |                                                                                                                                                                               |               |                     |
| 13. | Meningkatnya penyerapan tenaga kerja                 | Angka pengangguran terbuka                                                   | %           | -          | -           | -            | 3,40        | Program Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                                                               | 151.317.000   | Disnakertrankop-UKM |
| 14. | Meningkatnya daya beli masyarakat                    | Pengeluaran perkapita pertahun                                               | Juta rupiah | -          | -           | -            | 10.164      | Program Promosi Penanaman Modal Peyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                          | 936.160.000   | DPMPTSP             |
|     |                                                      |                                                                              |             |            |             |              |             | Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota      | 1.012.640.000 | DPMPTSP             |
|     |                                                      |                                                                              |             |            |             |              |             | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                       | 300.000.000   | DPMPTSP             |
|     |                                                      |                                                                              |             |            |             |              |             | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 193.480.000   | DPMPTSP             |
| 15. | Meningkatnya penanganan masalah Kesejahteraan Sosial | Persentase penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri            | %           | -          | -           | -            | 22,36       | Program Pemberdayaan Sosial                                                                                                                                                   | 3.055.590.000 | Dinas Sosial PMD    |
|     |                                                      |                                                                              |             |            |             |              |             | Program Rehabilitasi Sosial                                                                                                                                                   | 3.639.548.600 | Dinas Sosial PMD    |
|     |                                                      |                                                                              |             |            |             |              |             | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                                                                                                                       | 1.191.192.400 | Dinas Sosial PMD    |
|     |                                                      |                                                                              |             |            |             |              |             | Program Penanganan Bencana                                                                                                                                                    | 1.693.856.375 | Dinas Sosial PMD    |
| 16. | Meningkatnya ketertiban masyarakat                   | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) | %           | -          | -           | -            | 87,5        | Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                                   | 603.070.000   | Satpol PP           |
|     |                                                      |                                                                              |             |            |             |              |             | Program Peningkatan Keamanan dan Lingkungan                                                                                                                                   | 389.399.000   | Satpol PP           |
|     |                                                      |                                                                              |             |            |             |              |             | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                 | 393.000.000   | Satpol PP           |

| No. | Sasaran Strategis                      | Indikator Kinerja                        | Satuan | Target     |             |              |             | Program                                                                                                                 | Anggaran       | Penanggung Jawab |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------|--------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|     |                                        |                                          |        | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |                                                                                                                         |                |                  |
| 17. | Meningkatnya penanganan konflik        | Persentase kasus konflik yang tertangani | %      | -          | -           | -            | 80          | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                 | 787.230.000    | Bakesbangpol     |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                            | 2.673.017.850  | Bakesbangpol     |
| 18  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup         | Nilai  | -          | -           | -            | 73,68       | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | 791.120.710    | DLH              |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                    | 3.930.572.500  | DLH              |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                                               | 190.847.100    | DLH              |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                | 15.730.000     | DLH              |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 368.906.000    | DLH              |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH           | 284.672.000    | DLH              |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | 279.952.000    | DLH              |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                                   | 20.000.000     | DLH              |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | 222.947.000    | DLH              |
|     |                                        |                                          |        |            |             |              |             | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | 10.964.270.000 | DLH              |



| No. | Sasaran Strategis     | Indikator Kinerja          | Satuan | Target     |             |              |             | Program                                                                     | Anggaran        | Penanggung Jawab                     |
|-----|-----------------------|----------------------------|--------|------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|     |                       |                            |        | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |                                                                             |                 |                                      |
| 19. | Menurunnya stunting   | Angka Prevalensi Stunting  | %      | -          | -           | -            | 16          | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | 77.602.668.903  | Dinas Kesehatan                      |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pembinaan Keluarga Berencana                                        | 1.697.860.000   | Dsidalduk KB P3A                     |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera                     | 1.656.303.750   | Dsidalduk KB P3A                     |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                                       | 144.145.900     | Dsidalduk KB P3A                     |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak                             | 50.000.000      | Dsidalduk KB P3A                     |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pemenuhan Hak Anak                                                  | 140.000.000     | Dsidalduk KB P3A                     |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Perlindungan Khusus Anak                                            | 145.000.000     | Dsidalduk KB P3A                     |
| 20. | Menurunnya kemiskinan | Persentase penduduk miskin | %      | -          | -           | -            | 5,07        | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial                                     | 1.191.192.400   | Dinas Sosial PMD                     |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | 77.602.668.903  | Dinas Kesehatan                      |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | 259.447.879.038 | Dinas Pendidikan                     |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman                                    | 3.921.374.375   | Disperkimtan                         |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Kawasan Permukiman                                                  | 2.722.660.000   | Disperkimtan                         |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                              | 442.556.000     | Disnakertrankop-UKM                  |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)     | 70.379.000      | Disnakertrankop-UKM                  |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Penempatan Tenaga Kerja                                             | 151.317.000     | Disnakertrankop-UKM                  |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                       | 671.991.530     | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                      | 3.463.174.240   | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
|     |                       |                            |        |            |             |              |             | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                        | 27.950.166.355  | Dinas Pertanian                      |



| No. | Sasaran Strategis                                                          | Indikator Kinerja                | Satuan           | Target     |             |              |             | Program                                                                                                                | Anggaran       | Penanggung Jawab   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
|     |                                                                            |                                  |                  | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |                                                                                                                        |                |                    |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                                                              | 8.164.778.100  | Dinas PUPR         |
| 21. | Meningkatnya penerapan Reformasi Birokrasi                                 | Indeks Reformasi Birokrasi       | Kategori (nilai) | -          | -           | -            | B (61)      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Penataan Organisasi)                             | 1.497.000.000  | Sekretariat Daerah |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                                          | 2.311.882.750  | Sekretariat Daerah |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Perekonomian dan Pembangunan.                                                                                  | 1.705.400.625  | Sekretariat Daerah |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Kepegawaian Daerah                                                                                             | 20.512.339.750 | BKPSDM             |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                     | 2.390.640.000  | Inspektorat        |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                                                                | 851.564.000    | Inspektorat        |
| 22. | Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP                      | Kategori (nilai) | -          | -           | -            | B (67)      | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                      | 2.401.082.750  | Bappedalitbang     |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                     | 1.779.476.000  | Bappedalitbang     |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                     | 2.390.640.000  | Inspektorat        |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (subkegiatan Peningkatan Kinerja dan RB)                   | 580.000.000    | Sekretariat Daerah |
| 23. | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Predikat (nilai) | -          | -           | B (78)       | -           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana) | 407.000.000    | Sekretariat Daerah |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Pendaftaran Penduduk                                                                                           | 433.466.250    | Dsidukcapil        |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Pencatatan Sipil                                                                                               | 394.562.250    | Dsidukcapil        |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                | 231.648.750    | Dsidukcapil        |
|     |                                                                            |                                  |                  |            |             |              |             | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                                | 38.000.000     | Dsidukcapil        |

| No. | Sasaran Strategis                        | Indikator Kinerja | Satuan               | Target     |             |              |             | Program                                                                                                                                                                          | Anggaran      | Penanggung Jawab |
|-----|------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|-------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
|     |                                          |                   |                      | Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |                                                                                                                                                                                  |               |                  |
|     |                                          |                   |                      |            |             |              |             | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal<br>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 193.480.000   | DPMPTSP          |
| 24. | Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | Opini BPK         | Predikat (opini ke-) | -          | -           | WTP          | -           | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                              | 5.135.219.125 | BPKA             |
|     |                                          |                   |                      |            |             |              |             | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                          | 1.092.620.675 | BPKA             |
|     |                                          |                   |                      |            |             |              |             | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                                                                                                                               | 2.390.640.000 | Inspektorat      |

Muara Teweh, 27 Februari 2025  
Pj. Bupati Barito Utara



Muhlis



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
2026